DEMAK

LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

(0291)685368 dinlutkan.demakkab.go.id dinlutkandemak@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai wujud komitmen kami dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kinerja berorientasi hasil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian sasaran strategis, realisasi program dan kegiatan, evaluasi kinerja, serta berbagai upaya perbaikan yang telah dan akan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, hasil evaluasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat.

Demak, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

Ir. Nanang Tasunar D.N, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 199303 1 009

Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu "**DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA**".

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya misi ke 1 (satu) yaitu "Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya" dan misi ke 3 (tiga) yaitu "Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran".

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi adalah dengan menetapankan indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Tujuan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi 91,66 dengan capaian 100,01% dari target 91,65 dan termasuk predikat "**Sangat Tingg**i";
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi 79,41 dengan capaian 100,14% dari target 79,30 dan termasuk predikat "**Sangat Tinggi**";
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan dengan indikator LPE Subkategori Perikanan terealisasi 0,74 dengan capaian dari target 5,67, dengan capaian 13,07 kriteria penilaian "**Sangat Rendah**".

Tujuan di atas dicapai dengan beberapa sasaran, yaiitu:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti terealisasi 100% dengan capaian 100% dari target 100% dan termasuk predikat **"Sangat Tinggi"**
2. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi 83,33% dengan capaian 83,33% dari target 100% dan termasuk predikat **"Tinggi"**
3. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan. dengan indikator jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya terealisasi 61.139,80 dengan capaian 100,17 dari target 61.035 dan termasuk predikat **"Sangat Tinggi"**
4. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan. terealisasi 8,9 dengan capaian 100,17% dari target 8,8 dan termasuk predikat **"Sangat Tinggi".**

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan kuat pada aspek tata kelola dan pelayanan publik, dengan seluruh indikator melampaui target dan berpredikat "Sangat Tinggi", sehingga memperkuat fondasi pencapaian visi Kabupaten Demak.

Di sisi lain, rendahnya capaian LPE subkategori perikanan (0,74 dari target 5,67) mengindikasikan bahwa peningkatan produksi yang telah berhasil dicapai belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah ekonomi, terutama pada aspek hilirisasi, distribusi, dan akses pasar.

Ke depan, fokus perbaikan diarahkan pada penguatan hilirisasi berbasis UMKM, perluasan pasar, stabilisasi produksi dan harga, serta peningkatan kualitas SDM. Dengan langkah yang lebih terarah, sektor perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **ii**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR BAGAN ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Gambaran Organisasi 3
1.5 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana 4
1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinlutkan Kabupaten Demak 9
1.7 Keuangan 10
1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA **13**
2.1 Perencanaan Strategis 13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 15
2.1.3 Strategi, program dan Kegiatan 15
2.2 Perjanjian Kinerja 21
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025 22
2.4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 ..... **26**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26
3.2 Analisis kinerja sasaran strategis 29
3.2.1 Capaian Kinerja per sasaran 29
3.3 Realisasi Anggaran 120
3.4 Efisiensi penggunaan anggaran 120
BAB IV PENUTUP **127**
4.1 Simpulan 127
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 129
4.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja 131

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....4
Gambar 1.2. Sarana dan Prasarana Penunjang kegitan DINLUTKAN.....8
Gambar 3.1. Nilai IKM Perangkat Daerah di Kabupaten Demak 35
Gambar 3.2. Pengisian Koesioner survey kepuasan Masyarakat oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan terhadap pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak.....39
Gambar 3.3. Fasilitas ruang tunggu dan pelayanan.....40
Gambar 3.4. Informasi Pelayanan Yang Dipublikasikan.....40
Gambar 3.5. Pelayanan konsultasi, pembinaan, pendampingan kelompok Nelayan.....40
Gambar 3.6. Pelayanan persyaratan Rekom BBM dan prosedur admintrasi bantuan bibit ikan.....49
Gambar 3.7. Penanganan Pengaduan baik melalui medsos maupun secara langsung ke Dinas.....49
Gambar 3.8. Media Informasi pelayanan (*website)*.....51
Gambar 3.9. Aplikasi e-Sakip.....60
Gambar 3.10 Laporan Monev Triwulan IV 2025 dan BA Monev.....61
Gambar 3.11 Laporan LHE SAKIP DINLUTKAN dan Tindak Lanjut LHE 62
Gambar 3.12 Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen 71
Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Struktural, Pelaksana, Fungsional dan Penyuluh dalam evaluasi kinerja kegiatan 72
Gambar 3.14 Sinkronisasi program/ kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja Daerah 73
Gambar 3.15 Grafik LPE Kategori Perikanan.....79
Gambar 3.16 Pelatihan Olahan Frozen Food Produk Perikanan dan memberikan bantuan sarana pengolahan kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan.....91
Gambar 3.17 Pelatihan, pemberian bibit dan pakan pada kelompok pembudidaya ikan, dan penyediaan alat tangkap usaha perikanan.....102
Gambar 3.18 Pemberian alat tangkap usaha perikanan 102
Gambar 3.19 Dashboard Aplikasi ADIPTa.....103

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 5
Tabel 1.3 Sarana Prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan..... 6
Tabel 2.1 Strategi, Program dan Kegiatan..... 16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 19
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2025)..... 20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 22
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 23
Tabel 2.6 Rencana Anggaran per Sasaran Strategis TA 2025 25
Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja 26
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 27
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan 29
Tabel 3. 4 Nilai Persepsi 32
Tabel 3. 5 Rincian setiap unsur IKM Dinlutkan Tahun 2025..... 32
Tabel 3. 6 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 41
Tabel 3.7 Capaian kinerja Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 44
Tabel 3.8 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti 51
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 53
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja 55
Tabel 3.11 Nilai SAKIP di 41 Perangkat Daerah Kabupaten Demak 56
Tabel 3.12 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Nilai SAKIP..... 63
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 65
Tabel 3.14 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target..... 74
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan 78
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan 84

Daftar Tabel

Tabel 3.17 Jumlah dan nilai produksi pengolahan hasil perikanan..... 85
Tabel 3.18 Bantuan sarana pengolahan kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan..... 89
Tabel 3.19 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan 92
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan 94
Tabel 3.21 Produksi Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021-2025 95
Tabel 3.22 Matriks Peran Kolaborasi Lintas Sektor Program *Blue-Coast*..... 98
Tabel 3.23 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya 105
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Realisasi Anggaran Tahun 2025 108
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Tahun 2025 120
Tabel 3.26 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran dan Tingkat efisiensi..... 125
Tabel 4.1 Strategi Peningkatan Kinerja Dinlutkan..... 129

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari Sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP.JMN) (2020-2024);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis dinas sesuai IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025;
b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025;
c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025;
b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output* selama Tahun 2025;
c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana selama tahun 2025;
d. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama tahun 2025;
e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025;
f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di tahun mendatang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, tugas Dinlutkan Kabupaten Demak adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan, pembidangan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

1.5 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.5.1 Susunan Kepegawaian Dinlutkan Kabupaten Demak

Susunan Kepegawaian sesuai Struktur Organisasi Dinlutkan Kabupaten Demak, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan;

d. Bidang Perikanan Budidaya;

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilhat pada bagan berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN	
		L	P	L	P	L	P
	SD	0	–	–	–	–	0
	SMP Sederajat	0	–	–	–	1	0
	SMA Sederajat	–	–	2	–	5	–
	D3	–	–	–	–	–	–
	S1	5	4	5	6	5	3
	S2	3	3	–	–	–	–
	S3	–	–	–	–	–	0
	S3	–	–	–	–	–	0
						Total	42

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memiliki 42 Pegawai terdiri dari 15 PNS, 13 PPPK dan 14 Non ASN, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	11	3	14
2	PPPK	7	6	13
3	PNS Golongan II	–	–	0
4	PNS Golongan III	5	6	11
5	PNS Golongan IV	3	1	4
			Total	42

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

1.5.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinlutkan Kabupaten Demak sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas adalah berikut :

Tabel 1.3 Sarana Prasarana
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

No.	Nama Aset	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	2016	2	Baik
	Pick up	2012	1	Baik
	Pick up	2015	1	Baik
	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	2008	1	Baik
	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	2024	1	Baik
	Bus	2016	1	Baik
2	Sepeda motor dinas	2012, 2013, 2014, 2015, 2016	19	Baik
3	Portable Compressor	2015	1	Baik
4	Mesin Pelet	2011	3	Baik
5	Mesin Proses lainya	2012	1	Baik
6	Portable Generating Set	2010, 2012	4	Baik
7	Portable Water Pump	2009, 2015, 2025	3	Baik
8	Pompa	2017, 2019, 2016	3	Baik
9	Genset	2019	1	Baik
10	Mesin Bor Tangan	2015	2	Baik
11	Dongkrak Hidrolik	2015	5	Baik
12	GPS	2011	2	Baik
13	Scanner	2012, 2013, 2014, 2020	4	Baik
14	Alat Ukur	2019	3	Baik
15	Pompa Air	2017	1	Baik
16	Excavator/ Bego	2014	1	Baik
17	Alat2 laboratorium	2019	33	Baik
18	Lemari	2010, 2011, 2012, 2014, 2020, 2021	63	Baik
19	Meja	2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2024	96	Baik
20	Kursi kerja	2005, 2019, 2012, 2014, 2020, 2021, 2024	104	Baik
21	Filing Cabinet	1990, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011	17	Baik
22	Lemari es	2007, 2010, 2024	4	Baik
23	Freezer	2010	2	Baik
24	Komputer/ PC	2008, 2011, 2012, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024	19	Baik
25	Laptop	2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	39	Baik
26	Printer	2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024	37	Baik
27	AC	2008, 2014, 2016, 2020, 2021, 2023, 2024	20	Baik
28	Layar Film/Projector	2011,2012,2015,2016, 2023	8	Baik
29	Kamera digital	2011	5	Baik
30	Handycam	2012	3	Baik
31	Sound system	2007, 2011, 2015	6	Baik
32	Televisi	2018, 2025	2	Baik
33	Mesin finger print	2017, 2023	2	Baik

34	Mesin poTong rumput	2016, 2019, 2022	5	Baik
35	R00I o pack	2020	1	Baik
36	Blander	2022	1	Baik
37	Almari	2021	7	Baik
38	Gordyn	2021	15,3 Meter	Baik
39	Alat Pencacah	2021	1	Baik
40	Water Heater 30L	2021	30 Liter	Baik
41	Printer	2022	3	Baik
42	Almari kaca	2010, 2020, 2021	7	Baik
43	CCTV	2019, 2023	2	Baik
44	Speaker portable	2023	1	Baik
45	Printer	2023	4	Baik
46	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2010, 2012, 2015	3	Baik
47	Kursi Lipat	2014, 2024	140	Baik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi aset secara umum dikelola dan dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan publik, pembinaan, serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kondisi aset, sebagian besar aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berada dalam kondisi baik dan layak digunakan. Aset dengan kondisi rusak ringan masih dapat dimanfaatkan dengan perbaikan terbatas, sedangkan aset dengan kondisi rusak berat memerlukan penanganan lebih lanjut melalui rehabilitasi atau penghapusan sesuai ketentuan.

Dari total 692 unit aset, sebanyak 85 persen berada dalam kondisi baik, sehingga secara umum mampu mendukung operasional dinas dan pencapaian kinerja secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan DINLUTKAN

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak meliputi fasilitas perkantoran, peralatan kerja, sarana transportasi operasional, serta sarana pendukung teknis kegiatan kelautan dan perikanan. Fasilitas perkantoran digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi, perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan koordinasi lintas sektor. Peralatan kerja dan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan data, penyusunan dokumen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sarana transportasi operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti pembinaan dan pendampingan nelayan dan pembudidaya ikan, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pengawasan di wilayah pesisir dan perairan. Sementara itu, sarana pendukung teknis perikanan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, pengolahan hasil perikanan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan kinerja organisasi.

1.6 Permasalahan Utama *(Strategic Issued)* yang dihadapi Dinlutkan Kabupaten Demak

Adapun permasalahan utama Dinlutkan yang harus segera ditangani diantaranya sebagai berikut :

1. Produktivitas tambak ikan dan udang di wilayah pesisir Kabupaten Demak belum optimal akibat abrasi pantai, intrusi air laut, rob, penurunan kualitas air, serta kerusakan ekosistem mangrove yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha budidaya.
2. Nelayan dan pembudidaya ikan menghadapi risiko tinggi akibat cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan banjir rob yang menyebabkan ketidakpastian hari melaut, kerusakan sarana produksi, serta penurunan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
3. Sebagian besar hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar tanpa pengolahan lanjutan, sehingga nilai tambah, standar mutu, daya saing, serta akses pasar yang lebih luas (ritel modern dan ekspor) belum optimal.
4. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan perikanan, *cold storage*, sarana pengolahan, serta infrastruktur budidaya belum memadai dan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.
5. Pemanfaatan teknologi budidaya, alat tangkap ramah lingkungan, sistem rantai dingin, serta teknologi informasi pemasaran dan pencatatan produksi masih terbatas, sehingga efisiensi usaha dan produktivitas belum optimal.
6. Kompetensi nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan hasil perikanan dalam aspek teknis, manajerial, dan kewirausahaan masih perlu ditingkatkan, seiring dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur teknis pendukung di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pengawasan terhadap aktivitas perikanan, penggunaan alat tangkap, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan lingkungan belum optimal karena keterbatasan SDM pengawas, sarana operasional, dan sistem monitoring.
8. Data produksi perikanan, sebaran usaha, kondisi ekosistem, serta data sosial ekonomi pelaku usaha belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir, sehingga mempengaruhi ketepatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
9. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat pesisir dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan belum berjalan optimal dan berkelanjutan.

1.7 Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada pencapaian kinerja perangkat daerah.

Pada awal Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 10.536.923.800. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 10.436.923.800,- dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 100.000.000,-. Komposisi anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta fungsi penunjang perangkat daerah.

Seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 10.093.195.297,-. Pada perubahan tersebut, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sebesar Rp. 9.993.195.297,-, sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 100.000.000,-.

Perubahan pagu anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar lebih berorientasi pada pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Secara umum, anggaran digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, pengembangan pengolahan hasil perikanan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinlutkan Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif	1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
Casecading
Pohon Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tujuan organisasiyang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan tuntutan reformasi, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.JMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.JMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan hal yang ingin dicapai mengenai keadaan Kabupaten Demak pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Demak dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan daerah Kabupaten Demak untuk periode 2021 - 2026 adalah "**DEMAK BERMARTABAT MAJU DAN SEJAHTERA**". Visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

a. Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalan bidang moralitas, etika, hukum dan politik.

Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

b. Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.
c. Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak tahun 2021 –2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai bagian dari elemen Pemerintah Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan ikut beRp.eran dalam memberikan pelayanan publik secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan, untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Demak melalui misi ke 1 (satu) yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” dan misi ketiga, yaitu “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 maka pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 tujuan yang akan dicapai guna mewujudkan misi ke 1 (satu) dan misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teRp.ilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan.

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsive;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan Kelautan;
4. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan.

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

a. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan sesuai standar untuk mencapai sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif, guna mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan publik.
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya capian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, guna mewujudkan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan merupakan strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan guna mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan.
4. Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan merupakan strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi olahan hasil perikanan guna

mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan.

b. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Nomor 060/2.2 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

SASARAN RPJMD	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	SUMBER DATA	FORMULASI	SATUAN
Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	TUJUAN: Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IKM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi × Nilai penimbang	Angka
	SASARAN: Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	setiap pengaduan, laporan, atau aspirasi masyarakat yang telah diproses oleh perangkat daerah melalui tahapan penanganan sesuai prosedur, mulai dari penerimaan hingga adanya respon atau penyelesaian	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / Σ Keluhan masyarakat yang masuk × 100 %	Angka
	TUJUAN: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas kinerja (pertanggungjawaban kinerja) dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	**Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP Dinlutkan Kabupaten Demak pada tahun evaluasi**	Persen
	SASARAN: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target	indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang dinyatakan berhasil apabila nilai realisasinya pada akhir periode pelaporan telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu minimal mencapai 100% (realisasi ≥ target)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	realisasi kinerja sasaran strategis / target sasaran strategis × 100%	Persen
	TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan	LPE Subkategori Perikanan	Pertumbuhan nil sektor perikanan mencerminkan besarnya peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari seluruh aktivitas perikanan, meliputi perikanan tangkap, budidaya, dan kegiatan pendukungnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak dan BPS Demak	$LPE_{(n,i)} = \frac{PDRB_{(n,k,i)} - PDRB_{(n-1,k,i)}}{PDRB_{(n-1,k,i)}} \times 100$ LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi k = a.d.h. Konstan n = Tahun Berlaku i = Sektor/ subsektor	Persen
	SASARAN: Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	meningkatnya kinerja UKM binaan yang ditunjukkan oleh kenaikan harga jual produk (nilai tambah), perluasan jangkauan pemasaran (akses pasar), serta peningkatan omset atau skala usaha (perkembangan usaha), yang diukur dari data usaha yang valid dan diverifikasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	(Realisasi produksi-Target produksi) / Target produksi x 100%	Persen
	SASARAN: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Tangkap, dan Kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Peningkatan omset UKM pengolahan hasil perikanan merupakan persentase selisih produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun laporan dibanding produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun sebelumnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap + Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	TON

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan pelayanan publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Angka**	**92,65**
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	**Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Nilai**	**79,30**
Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target	%	100
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan	**LPE Subkategori Perikanan**	**Nilai**	**5,67**
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	8,8
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	61.035

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknisi Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pimpinan unit kerja yang menerima Amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Demak dan mendukung target capaian Kepala Daerah pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Demak maka diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja antara Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini diwakili Kepala Dinas dan Bupati Kabupaten Demak dijadikan landasan pengukuran kinerja pada tahun 2025.

Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dan Bupati ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk perjanjian kinerja berjenjang yaitu antara Kepala Dinas (Eselon II) dan Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III), dan antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan sampai Staff. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak didukung oleh 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan, dengan total anggaran Tahun Anggaran 2025 (murni) sebesar Rp. 10.536.923.800, yang selanjutnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 10.093.195.297.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dengan Bupati Demak Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,5
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**	Nilai SAKIP	Nilai	79,3
4	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100
5	**Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan**	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	%	5,67
6	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Tangkap Dan Kelautan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	Ton	59.840
7	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolah Hasil Perikanan	%	8,8

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.822.423.800,00	DAU
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.600.000.000,00	DAU
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.964.500.000,00	DAU, DBHCHT
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.150.000.000,00	DAU

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2025

2.3 Rencana Anggaran Perubahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,65
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**	Nilai SAKIP	Nilai	79,30
4	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100
5	**Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan**	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	%	5,67
6	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Tangkap Dan Kelautan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	Ton	61.035
7	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolah Hasil Perikanan	%	8,8

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.411.822.767	DAU
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.584.082.530	DAU
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.925.270.000	DAU, DBHCHT
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.172.020.000	DAU

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2025

Perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak menunjukkan adanya beberapa penyesuaian target kinerja antara dokumen awal dan dokumen perubahan. Secara umum, struktur sasaran strategis dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan, namun terdapat penyesuaian pada beberapa nilai target yang mencerminkan penyempurnaan perencanaan kinerja.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, terjadi sedikit penyesuaian target dari 91,5 menjadi 91,65, yang menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi terhadap kualitas pelayanan publik. Perubahan yang cukup signifikan terdapat pada indikator Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), dimana target meningkat dari 59.840 ton menjadi 61.035 ton. Kenaikan ini mencerminkan adanya optimisme dan dorongan peningkatan produksi sektor perikanan baik dari subsektor tangkap maupun budidaya.

Sementara itu, indikator lainnya seperti Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target, Laju Pertumbuhan Ekonomi Subkategori Perikanan, serta Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan tidak mengalami perubahan, yang menunjukkan konsistensi target pada aspek responsivitas pelayanan, capaian kinerja strategis, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan usaha pengolahan.

Mencermati target perjanjian kinerja kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 guna mencapai tujuan dan sasaran diatas total anggaran murni sebesar Rp. 10.536.923.800 setelah perubahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 443.728.503 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 10.093.195.297.

2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak setelah perubahan terakhir adalah sebesar Rp. 10.093.195.297.

Tabel 2.6 Rencana Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Presentase (%)
1	**Meningkatkan pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	989.727.000	**9,81**
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		
2	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Nilai SAKIP DinasKelautan dan Perikanan**	4.422.095.767	43,81
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikatorkinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target		
3	**Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan**	**LPE Subkategori Perikanan**	4.714.500.000	**46,38**
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan		
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya		
	TOTAL		10.093.195.297	100

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan difokuskan pada tiga tujuan utama pembangunan. Pertama, peningkatan pelayanan publik melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 989.727.000 atau 9,81% dari total anggaran. Kedua, peningkatan akuntabilitas kinerja dinas yang diukur melalui nilai SAKIP serta persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis, dengan alokasi sebesar Rp. 4.422.095.767 atau 43,81%. Ketiga, peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan sebagai prioritas utama, yang mencakup indikator LPE subkategori perikanan, peningkatan omzet UKM pengolahan, serta total produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp. 4.714.500.000 atau 46,38%. Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 10.093.195.297, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kinerja pelayanan, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan secara berimbang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisikan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teRp.ilih Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90%	Tinggi	
3	66 ≤ 75%	Sedang	
4	51 ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Hingga akhir tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dengan cara pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap kinerja meliputi capaian kinerja serta efisiensi dan efektivitas sumber daya. Efisiensi diukur dengan selisih capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran. Sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikalikan 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,65	91,66	100,01	**Sangat Tinggi**
2	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	**Sangat Tinggi**
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	79,30	79,41	100,14	**Sangat Tinggi**
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target	%	100	83,33	83,33	Tinggi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
5	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan	LPE subkategori perikanan	%	5,67	0,74	13,05	**Sangat Rendah**
6	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan omset UKM pengolahan hasil perikanan	%	8,8	8,9	101,14	**Sangat Tinggi**
7	Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan	Total produksi perikanan tangkap dan budidaya	Ton	61035	61139,8	100,17	**Sangat Tinggi**

Sumber: Dinlutkan data diolah 2025

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target yang ditetapkan sebesar 91,65 berhasil direalisasikan sebesar 91,66, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 100,01%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, yang mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pelayanan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang semakin memadai.

Pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, yang diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Subkategori Perikanan, capaian kinerja masih perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di lapangan, antara lain adanya pendangkalan di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menghambat aktivitas sandar dan bongkar muat kapal nelayan, sehingga berdampak pada menurunnya volume pendaratan ikan. Selain itu, masih adanya kecenderungan nelayan menjual hasil tangkapan di luar wilayah Kabupaten Demak menyebabkan produksi perikanan tidak tercatat secara optimal dalam wilayah, yang pada akhirnya mempengaruhi kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, indikator jumlah total produksi perikanan menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi telah dilakukan, namun capaian belum sepenuhnya optimal.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan produksi. Di sisi lain, dukungan program seperti peningkatan jumlah trip melaut, optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya, serta pembinaan kepada pelaku usaha perikanan menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan produksi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa sasaran telah tercapai dengan sangat baik, khususnya pada aspek pelayanan publik. Namun demikian, pada sasaran yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan produksi perikanan masih diperlukan upaya perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, baik melalui peningkatan infrastruktur, penguatan kebijakan, maupun optimalisasi pencatatan data produksi, sehingga ke depan seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal.

3.2. Analisis kinerja sasaran strategis

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1 Capaian kinerja per sasaran strategis

1. Analisis kinerja **Tujuan 1 : "Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan"**

   Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100,01% dan termasuk predikat "Sangat Tinggi" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Indeks Kepuasan Masyarakat	**90,73**	**92,02**	**91,49**	**91,56**	**91,65**	**91,66**	**100,01**	**88,5**	**103,60**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja indikator pada tahun 2025 mencapai angka 91,66, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,65. Capaian ini menghasilkan persentase capaian sebesar 100,01%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan presisi sesuai dengan perencanaan. Tingkat pencapaian yang nyaris sempurna ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan mampu menjaga stabilitas kinerja sekaligus memastikan target yang ditetapkan dapat teRp.enuhi secara optimal.

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya (2021–2024), terlihat bahwa capaian indikator menunjukkan tren yang relatif stabil dan konsisten pada level tinggi. Realisasi kinerja tercatat sebesar 90,73 pada tahun 2021, meningkat menjadi 92,02 pada tahun 2022, kemudian sedikit mengalami penyesuaian menjadi 91,49 pada tahun 2023 dan 91,56 pada tahun 2024, hingga kembali meningkat menjadi 91,66 pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa kinerja indikator berada dalam kondisi terkendali dengan fluktuasi yang minimal, sehingga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kesinambungan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Kinerja indikator tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 88,5 menunjukkan capaian yang telah melampaui target jangka menengah tersebut. Dengan rasio capaian sebesar 100,01% terhadap target tahunan dan posisi realisasi yang berada di atas target akhir Renstra, hal ini menegaskan bahwa kinerja perangkat daerah telah berada pada jalur yang sangat baik dan bahkan mencapai target strategis lebih awal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan serta memberikan gambaran positif terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan beRp.edoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei IKM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Motode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan métode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala *Likert* merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur survei kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dimana terdapat 9

unsur :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistema, mekanisme dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/ tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner yang didasarkan pada panduan Permenpan Refoemasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayan Publik sebagai berikut :

a. Pengolahan data SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Oleh karena itu, pengolahan data dilakukan dengan cara:
   - Membuat *scoring*/ nilai persepsi untuk setiap alternatif jawaban (x) sebagai berikut: alternatif jawaban ‘a’ diberi nilai 1, ‘b’ diberi nilai 2, ‘c’ diberi nilai 3 dan ‘d’ diberi nilai 4.
   - Dalam memperhitungkan nilai SKM pada 10 unsur pelayanan yang telah diterjemahkan dalam 9 butir pertanyaan maka setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

     Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah butir}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$

     1) Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, maka digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

        $$SKM = \frac{\textit{Total nilai Persepsi per unsur}}{\textit{Total unsur yang ter isi}} \textit{ x nilai penimbang}$$

     2) Guna mempermudah inteRp.retasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus:

        SKM Unit Pelayanan x 25

3) Nilai Persepsi

Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang ditunjukkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.4 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan No. 14 Tahun 2017

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun (per semester) (sebagaimana Tabel 3.5) IKM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tahun 2025 adalah 91,66 dengan predikat kinerja pelayanan sangat baik atau kategori (A) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian setiap unsur IKM Dinlutkan Tahun 2025

Periode	IKM per U1	IKM per U2	IKM per U3	IKM per U4	IKM per U5	IKM per U6	IKM per U7	IKM per U8	IKM per U9	IKM Dinlutkan
Semester 1	3,60	3,50	3,50	3,99	3,62	3,66	3,74	3,76	3,63	3,67
Semester 2	3,59	3,57	3,57	4,00	3,69	3,64	3,71	3,79	3,50	3,67
Tahun 2025	3,60	3,54	3,54	4,00	3,66	3,65	3,73	3,78	3,57	3,67

U1 = Persyaratan
U2 = Prosedur
U3 = Waktu Pelayanan
U4 = Biaya/ Tarif
U5 = Produk layanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan Pelayanan
U9 = Sarana Prasarana

Berdasarkan Nilai Unsur dan Nilai Rata-Rata (NRR) 9 indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, periode Desember 2025, urutan tertinggi yaitu pada unsur Kejelasan/ kesesuaian biaya pelayanan dengan nilai rata-rata 4, diikuti unsur Perilaku petugas layanan dengan nilai rata-rata 3,71, diikuti Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,79.

Berbanding terbalik dengan hal diatas, ditemukan pula tiga unsur pelayanan dengan urutan terendah berdasarkan nilai rata-rata yaitu unsur Sarana dan prasarana memiliki nilai rata-rata yaitu 3,50 diikuti dengan unsur Kemudahan prosedur pelayanan memiliki nilai rata-rata yang sama dengan nilai rata-rata 3,57 dan diikuti dengan unsur Ketepatan waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3,57. Melihat hasil tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ditingkatkan terutama unsur-unsur dengan nilai rata-rata terendah.

Secara umum berdasarkan Kategorisasi Mutu Pelayanan yang diukur dengan 9 unsur pelayanan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Mutu Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berada pada level A, dengan Kinerja Unit Pelayanan pada level Sangat Baik. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yakni berkisar di antara 3,26 – 4 dengan Nilai SKM 3,67.

Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah unsur Kejelasan / kesesuaian biaya pelayanan.

Kualitas pelayanan di Bidang Tangkap juga dipersepsikan “Sangat Baik” (kategori A) dengan nilai SKM yaitu 3,48 Unsur yang dianggap paling memuaskan yaitu unsur Kejelasan/ kesesuaian biaya pelayanan.

Kualitas pelayanan di Bidang Budidaya juga dipersepsikan “Sangat Baik” (kategori A) dengan nilai SKM yaitu 3,77. Unsur yang dianggap paling memuaskan yaitu unsur Kejelasan/ kesesuaian biaya pelayanan.

Kualitas pelayanan di P2HP dipersepsikan “Sangat Baik” (kategori A) dengan nilai SKM yaitu 3,71. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan yaitu unsur Kejelasan/ kesesuaian biaya pelayanan.

Merujuk pada rumus tersebut, perolehan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak di Tahun 2025 sebesar 91,66. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM senilai 91,65 maka diperoleh capaian sebesar 100,01% dan apabila dibandingkan dengan

nilai IKM target akhir Renstra sebesar 88,5 maka diperoleh capaian 103,57% dengan predikat capaian “Sangat Tinggi”.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil SKM tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak (DINLUTKAN) memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,65.

Apabila dibandingkan dengan capaian IKM Perangkat Daerah lainnya, nilai IKM DINLUTKAN menempatkan organisasi ini pada peringkat ke-8 dari 26 Perangkat Daerah. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada kelompok atas dan lebih baik dibandingkan sebagian besar Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Demak.

Secara umum, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah memperoleh nilai IKM pada kategori “Baik”, dengan rentang nilai yang relatif tinggi. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan nilai IKM 91,65, berada di atas nilai rata-rata capaian Perangkat Daerah dan sejajar dengan perangkat daerah yang memiliki kinerja pelayanan publik unggul, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp.adu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah memenuhi harapan masyarakat, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan persyaratan, waktu pelayanan, maupun sikap dan kompetensi petugas. Hasil SKM ini menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang telah baik sekaligus melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.

Nilai IKM seluruh Perangkat Daerah dan unit organisasi secara lengkap disajikan pada gambar berikut sebagai bahan perbandingan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

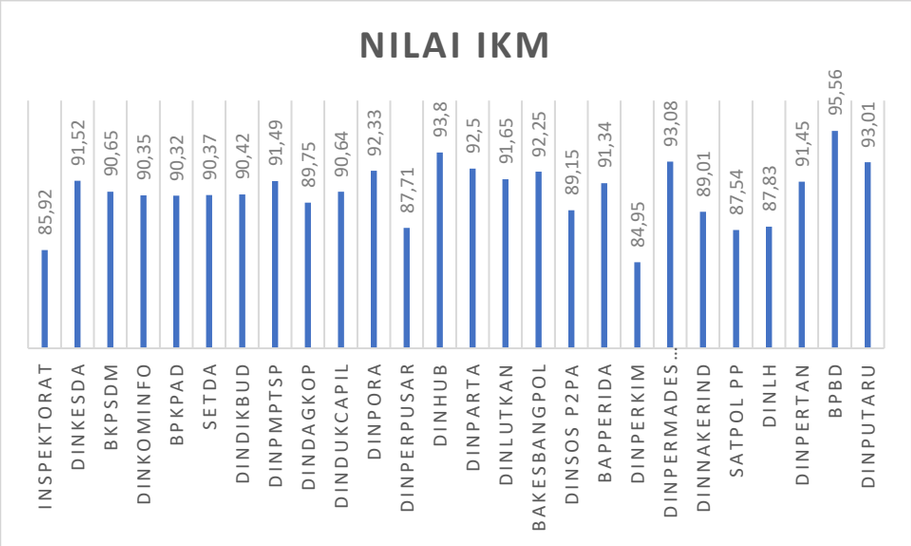

Gambar 3.1 Nilai IKM Perangkat Daerah di Kabupaten Demak Tahun 2025

a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja "**Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan 2025"**.

1) **Transparansi dan Kejelasan Biaya Pelayanan**

Salah satu faktor utama keberhasilan pelayanan publik adalah adanya kejelasan serta kesesuaian biaya pelayanan. Masyarakat menilai bahwa biaya layanan telah disampaikan secara terbuka, sesuai ketentuan, dan tidak memberatkan. Kondisi ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

2) **Sikap dan Profesionalisme Petugas Layanan**

Keberhasilan pelayanan juga didukung oleh perilaku aparatur yang ramah, sopan, komunikatif, dan profesional dalam memberikan layanan. Sikap petugas yang baik menciptakan kenyamanan bagi masyarakat serta memberikan pengalaman pelayanan yang positif.

3) **Penanganan Pengaduan yang Responsif**

Kemampuan perangkat daerah dalam menerima, menindaklanjuti, serta merespon pengaduan, saran, dan masukan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat menunjukkan adanya komitmen untuk terus melakukan perbaikan.

4) **Kualitas Pelayanan yang Konsisten di Setiap Bidang**

Keberhasilan peningkatan pelayanan publik juga terlihat dari kualitas pelayanan yang merata pada seluruh bidang teknis, baik pelayanan di bidang penangkapan ikan, budidaya, maupun pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan. Hal ini menunjukkan adanya standar pelayanan yang diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

5) **Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik**

Pelayanan yang baik didukung oleh penerapan standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi prosedur pelayanan, persyaratan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas, serta mekanisme pengaduan. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi dasar terciptanya pelayanan yang tertib dan akuntabel.

6) **Komitmen terhadap Perbaikan Berkelanjutan**

Meskipun capaian pelayanan sudah sangat baik, organisasi tetap melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, seperti sarana prasarana, kemudahan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Upaya evaluasi ini menunjukkan adanya budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara terus-menerus.

7) **Dukungan Kepemimpinan dan Koordinasi Internal**

Keberhasilan pelayanan publik juga tidak terlepas dari dukungan pimpinan serta koordinasi yang baik antarbidang. Sinergi internal organisasi mendorong pelaksanaan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan 2025.

1) **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Salah satu tantangan utama adalah masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Kondisi fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya optimal dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat, kelancaran proses layanan, serta efektivitas kerja aparatur dalam memberikan pelayanan.

2) **Kemudahan Prosedur Pelayanan yang Perlu Disederhanakan**

Masih terdapat persepsi masyarakat bahwa prosedur pelayanan perlu dibuat lebih mudah, sederhana, dan cepat dipahami. Proses administrasi yang dianggap cukup panjang atau kurang praktis dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

3) **Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan**

Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keterlambatan

penyelesaian layanan, baik karena proses administrasi maupun faktor teknis lainnya, dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

4) **Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan**
Meskipun pelayanan telah berjalan baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi kebutuhan. Kompetensi aparatur dalam komunikasi pelayanan, pemanfaatan teknologi, pemahaman regulasi, dan penyelesaian masalah perlu terus diperkuat agar pelayanan semakin profesional dan adaptif.

5) **Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal**
Digitalisasi pelayanan masih menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan layanan berbasis elektronik, sistem informasi pelayanan, maupun akses informasi secara daring. Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal dapat membatasi kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

6) **Tingginya Ekspektasi Masyarakat terhadap Pelayanan**
Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif. Peningkatan ekspektasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menyesuaikan kualitas layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

7) **Koordinasi Antarbidang dalam Pelayanan TeRp.adu**
Pelayanan yang melibatkan beberapa bidang memerlukan koordinasi yang cepat dan efektif. Apabila koordinasi internal belum optimal, maka dapat menimbulkan keterlambatan proses pelayanan atau ketidaksesuaian informasi yang diterima masyarakat.

8) **Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Layanan**
Upaya peningkatan fasilitas, inovasi pelayanan, pengembangan sistem digital, dan peningkatan kapasitas aparatur membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan 2025.

1) **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan**
Perlu dilakukan penguatan fasilitas pendukung pelayanan, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan tempat informasi, sarana akses bagi masyarakat, perangkat kerja petugas, serta fasilitas

pendukung lainnya. Sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendukung kelancaran proses pelayanan.

2) **Penyederhanaan Prosedur Pelayanan**

Melakukan evaluasi terhadap alur pelayanan agar prosedur menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami masyarakat. Penyusunan standar operasional prosedur yang ringkas serta penyampaian informasi persyaratan secara jelas akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

3) **Peningkatan Ketepatan Waktu Pelayanan**

Perlu dilakukan penguatan disiplin pelayanan melalui penetapan standar waktu penyelesaian layanan yang jelas, pemantauan kepatuhan terhadap standar waktu, serta percepatan proses administrasi internal. Dengan demikian, pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai harapan masyarakat.

4) **Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pelayanan terkait etika pelayanan, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penanganan pengaduan, dan peningkatan profesionalisme kerja. SDM yang kompeten akan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan responsif.

5) **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti layanan informasi daring, pengajuan permohonan secara online, kanal pengaduan elektronik, serta sistem monitoring pelayanan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat.

6) **Penguatan Sistem Pengaduan dan Tindak Lanjut**

Meningkatkan mekanisme penerimaan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi yang mudah dijangkau. Setiap pengaduan perlu ditindaklanjuti secara cepat, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi pelayanan.

7) **Peningkatan Koordinasi Internal Antarbidang**

Memperkuat sinergi antarbidang agar pelayanan yang membutuhkan lintas unit dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Koordinasi yang baik akan meminimalkan keterlambatan serta meningkatkan kepastian layanan kepada masyarakat.

8) **Evaluasi Berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat**

Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan forum konsultasi publik. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan perbaikan pelayanan yang lebih tepat sasaran.

9) **Penguatan Komitmen Budaya Pelayanan Prima**

Menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, integritas, keramahan, dan tanggung jawab kepada seluruh aparatur. Komitmen pelayanan prima menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan 2025.

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Teknis

Meliputi pelayanan penerbitan rekomendasi teknis, surat keterangan, dan administrasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat maupun pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian layanan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

2) Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas. Hasil survei digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah peningkatan mutu pelayanan publik.

Gambar 3.2 Pengisian Koesioner survey kepuasan Masyarakat oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan terhadap pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak

3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Meliputi penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ruang tunggu, papan informasi, fasilitas pendukung masyarakat, serta peralatan kerja petugas layanan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan pelayanan yang nyaman dan mudah diakses.

Gambar 3.3 fasilitas ruang tunggu dan pelayanan

4) Kegiatan Digitalisasi Pelayanan

Melalui pemanfaatan website, media sosial, layanan informasi daring, serta sistem administrasi elektronik guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Gambar 3.4 Informasi Pelayanan Yang Dipublikasikan

5) Kegiatan Pelayanan Teknis kepada Masyarakat Perikanan

Meliputi pelayanan konsultasi, pembinaan, pendampingan kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, serta fasilitasi kebutuhan teknis masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

Gambar 3.5 Pelayanan konsultasi, pembinaan, pendampingan kelompok nelayan

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 989.727.000 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 951.982.289 atau mencapai 96,19%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target. Meskipun demikian, masih terdapat selisih anggaran sekitar 3,81% yang belum terserap, yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan kegiatan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program utama dalam menunjang kinerja organisasi. Program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, melalui pelaksanaan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, administrasi perkantoran, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan kinerja. Dengan dukungan program ini, proses manajemen kinerja dapat berjalan secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, capaian kinerja organisasi, serta penguatan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 1: Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,65	91,66	100,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	989.727.000	951.982.289	96,19
	Capaian					**100,01**	**Jumlah**	**989.727.000**	**951.982.289**	**96,19**
TINGKAT EFISIENSI: 3,82										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 103,97%										

Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam konteks pencapaian kinerja dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan outcome yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya, anggaran, serta kapasitas birokrasi secara tepat guna. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja sebesar 91,66 dari target 91,65 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,82 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan terkendali. Realisasi kinerja yang sedikit melampaui target menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta efisien.

a. **Keunggulan Komparatif (Efisiensi Relatif)**

   Menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang tersedia, baik SDM, anggaran, maupun sistem pendukung, perangkat daerah mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian sebesar 91,66 yang sedikit lebih tinggi dari target 91,65 mengindikasikan bahwa proses pengelolaan kinerja telah berjalan efisien, dimana output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

b. **Optimalisasi Proses Internal**

   Efisiensi juga tercermin dari optimalnya proses internal organisasi, dimana perencanaan, pelaksanaan program, dan pengendalian kegiatan berjalan selaras. Minimnya deviasi antara target dan realisasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal telah berjalan efektif, sehingga potensi pemborosan sumber daya dapat ditekan dan pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

c. **Efisiensi Perencanaan**

   Kesesuaian antara target kinerja dan realisasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, telah disusun secara realistis dan berbasis kapasitas organisasi. Hal ini berdampak pada tercapainya target tanpa memerlukan penyesuaian signifikan di tengah pelaksanaan, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien.

d. **Proses Bisnis dan Inovasi**

   Efisiensi juga didukung oleh perbaikan proses bisnis dan inovasi dalam pelaksanaan program, termasuk peningkatan koordinasi antar unit kerja, penyederhanaan prosedur kerja, serta pemanfaatan sistem informasi. Hal

ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas tata kelola kinerja organisasi secara keseluruhan.

Analisis Efektivitas

Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, tercermin dari realisasi kinerja sebesar 91,66 yang melampaui target 91,65, dengan tingkat efektivitas sebesar 103,97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan bahkan melebihi target yang direncanakan.

a. **Capaian Melampaui Target Tahunan**

   Target kinerja yang ditetapkan sebesar 91,65 berhasil direalisasikan sebesar 91,66. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan, sehingga tingkat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikategorikan sangat efektif.

b. **Konsistensi Pencapaian Kinerja**

   Capaian yang melampaui target mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah berjalan secara sinergis, terarah, dan sesuai rencana yang ditetapkan.

c. **Efektivitas Implementasi Program**

   Keberhasilan pencapaian target menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, intervensi dan kebijakan yang dilakukan dapat dinilai efektif dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.

d. **Tingkat Efektivitas Kinerja**

   Tingkat efektivitas sebesar 103,97% menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan hasil yang lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil (*result oriented*), serta optimalisasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

2. Analisis kinerja **Sasaran 1: "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif"**

   Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100 % dan termasuk predikat "Sangat Tinggi", sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun, indikator **Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti** menunjukkan hasil yang sangat konsisten dan optimal. Pada periode Tahun 2021 hingga Tahun 2024, realisasi capaian tercatat sebesar 100% setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh keluhan masyarakat yang masuk telah berhasil ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, target kinerja kembali ditetapkan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tetap berada pada tingkat maksimal. Hasil ini menegaskan adanya konsistensi kinerja organisasi dalam menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan tuntas.

Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun, tidak terdapat penurunan capaian pada indikator ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan keluhan masyarakat telah berjalan efektif, didukung koordinasi internal yang baik, komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan responsif, serta mekanisme tindak lanjut pengaduan yang jelas.

Selain itu, capaian Tahun 2025 juga telah memenuhi Target Akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100%, dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 100%. Artinya, target strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah telah tercapai lebih awal.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan performa

yang sangat baik dan stabil selama lima tahun terakhir. Ke depan, tantangan utama bukan lagi meningkatkan angka capaian, melainkan mempertahankan kualitas tindak lanjut keluhan, mempercepat waktu respon, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses penyelesaian pengaduan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

Keluhan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluhan ini memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam menyesuaikan dan memperbaiki layanan. Untuk menghitung persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluhan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keluhan yang Diterima}}\right) \times 100\%$$

Progress mencapai target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 100% di tahun terakhir periode jangka menengah (2026) masih tetap konsisten di angka 100%. Sementara itu, tren positif anual dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terjadi dikarenakan adanya kemudahan menyampaikan, pengaduan secara langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. *Outcome* yang dihasilkan dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam wujud menindaklanjuti pengaduan yang masuk benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu berupa cepatnya penanganan pengaduan. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tetap terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduannya baik melalui medsos maupun secara langsung ke Dinas.

a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 2025.

   1) **Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat yang mudah diakses**

      Keberhasilan pelayanan publik yang responsif didukung oleh adanya sarana pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, baik melalui pelayanan langsung, surat, telepon, media sosial, maupun kanal komunikasi lainnya. Kemudahan akses ini mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi.

2) **Kecepatan Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat**

Setiap pengaduan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai jenis permasalahan yang disampaikan. Respon yang cepat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap aduan mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius.

3) **Sikap Ramah dan Responsif Petugas Pelayanan**

Petugas pelayanan memiliki sikap ramah, sopan, komunikatif, dan sigap dalam melayani masyarakat. Perilaku aparatur yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan kenyamanan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah.

4) **Kejelasan Informasi Pelayanan**

Masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan. Keterbukaan informasi ini membantu masyarakat memahami proses layanan dan meminimalkan kesalahpahaman.

5) **Adanya kepastian penyelesaian pengaduan**

Setiap keluhan masyarakat ditangani melalui mekanisme yang jelas hingga selesai. Kepastian penyelesaian menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang akuntabel dan memberikan rasa puas kepada masyarakat.

6) **Koordinasi cepat antar Unit Pelayanan**

Apabila pengaduan menyangkut lebih dari satu bidang, koordinasi antar unit kerja dapat dilakukan dengan cepat sehingga penanganan masalah tidak berlarut-larut. Hal ini mendukung terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.

7) **Ketersediaan Sarana Pelayanan yang mendukung**

Keberhasilan pelayanan publik juga didukung oleh tersedianya ruang pelayanan, meja informasi, fasilitas komunikasi, serta sarana pendukung lainnya yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan secara nyaman.

8) **Evaluasi Pelayanan melalui Masukan Masyarakat**

Masukan, saran, dan keluhan masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan adanya evaluasi berkelanjutan, pelayanan menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9) **Komitmen terhadap Pelayanan Prima**

Seluruh aparatur memiliki komitmen untuk menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Orientasi kerja yang mengutamakan kepuasan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik yang responsif.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 2025.

1) **Sarana ruang pelayanan yang perlu ditingkatkan**

Kenyamanan ruang tunggu, tempat konsultasi, papan informasi, tempat parkir, serta fasilitas pendukung lainnya masih menjadi tantangan dalam menciptakan pelayanan publik yang nyaman dan ramah masyarakat.

2) **Ketersediaan Kanal Pengaduan yang belum dimanfaatkan maksimal**

Meskipun kanal pengaduan tersedia, tidak semua masyarakat mengetahui atau memanfaatkannya. Sebagian masyarakat masih enggan menyampaikan keluhan karena kurang memahami mekanisme penyampaian pengaduan.

3) **Ketepatan waktu penyelesaian layanan**

Masyarakat mengharapkan setiap pelayanan selesai sesuai standar waktu yang dijanjikan. Jika terjadi keterlambatan karena proses internal atau kelengkapan dokumen, maka tingkat kepuasan masyarakat dapat menurun.

4) **Pelayanan kepada masyarakat dengan beragam karakteristik**

Petugas melayani masyarakat dengan latar belakang pendidikan, usia, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tantangannya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang adil, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna layanan.

5) **Pemanfaatan Layanan Digital yang Belum Merata**

Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan online atau media digital untuk memperoleh informasi dan mengakses pelayanan. Hal ini menyebabkan sebagian pelayanan masih bergantung pada tatap muka langsung.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 2025.

1) **Mempercepat waktu respon pelayanan dan pengaduan**
Menetapkan standar waktu respon yang jelas terhadap permohonan layanan, pertanyaan, maupun pengaduan masyarakat. Setiap aduan yang masuk perlu segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti agar masyarakat memperoleh kepastian layanan secara cepat.

2) **Menyederhanakan prosedur pelayanan**
Melakukan evaluasi dan penyederhanaan alur pelayanan, persyaratan administrasi, serta tahapan verifikasi agar proses layanan menjadi lebih singkat, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.

3) **Meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan**
Menyediakan informasi pelayanan yang lengkap dan mudah dipahami terkait jenis layanan, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan melalui papan informasi, website, media sosial, dan brosur layanan.

4) **Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan**
Melengkapi fasilitas ruang pelayanan seperti ruang tunggu yang nyaman, meja informasi, sarana antrean, tempat parkir, akses bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya agar masyarakat merasa nyaman saat menerima layanan.

5) **Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat**
Memperluas dan mempermudah akses pengaduan melalui layanan tatap muka, telepon, WhatsApp, email, media sosial, maupun aplikasi digital. Sosialisasi kanal pengaduan perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui cara menyampaikan keluhan.

6) **Meningkatkan kompetensi dan sikap petugas pelayanan**
Melaksanakan pelatihan pelayanan prima, etika komunikasi, penanganan keluhan, dan penguatan budaya kerja melayani. Petugas perlu dibekali kemampuan untuk memberikan layanan yang ramah, sabar, cepat, dan solutif.

7) **Menjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan**
Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar waktu pelayanan serta monitoring berkala terhadap jenis layanan yang sering mengalami keterlambatan. Dengan demikian, penyelesaian layanan dapat lebih tepat waktu.

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 2025.

1) Kegiatan Pelayanan Informasi dan Konsultasi Masyarakat

Meliputi pemberian informasi mengenai program, persyaratan layanan, prosedur administrasi, bantuan pemerintah, serta konsultasi teknis bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan ini mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat memperoleh layanan.

Gambar 3.6 Pelayanan persyaratan Rekom BBM dan prosedur admintrasi bantuan bibit ikan

2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Meliputi penerimaan, pencatatan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan maupun permasalahan sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini menjadi inti pelayanan publik yang responsif.

Gambar 3.7 Penanganan Pengaduan baik melalui medsos maupun secara langsung ke Dinas

3) **Kegiatan Penyediaan Media Informasi Pelayanan**

Meliputi penyediaan papan informasi, banner layanan, website, media sosial, serta publikasi lainnya agar masyarakat mudah mengetahui jenis layanan, prosedur, dan persyaratan pelayanan.

Gambar 3.8 Media Informasi pelayanan (*website*)

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 989.727.000 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 951.982.289 atau mencapai 96,19%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target. Meskipun demikian, masih terdapat selisih anggaran sekitar 3,81% yang belum terserap, yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan kegiatan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program utama dalam menunjang kinerja organisasi. Program yang dilaksanakan memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan yang dibiayai mencakup perencanaan, penganggaran, administrasi perkantoran, monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyusunan pelaporan kinerja.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/ Kota	989.727.000	951.982.289	96,19
	Capaian					**100**	**Jumlah**	**989.727.000**	**951.982.289**	**96,19**
TINGKAT EFISIENSI: 3,81										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 103,96%										

Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam konteks pencapaian kinerja dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan outcome yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya, anggaran, serta kapasitas birokrasi secara tepat guna. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,81 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan terkendali. Realisasi kinerja yang mencapai target menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta efisien.

a. Keunggulan Komparatif (Efisiensi Relatif)

   Menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang tersedia, baik SDM, anggaran, maupun sistem pendukung, perangkat daerah mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian sebesar 100 yang sama dengan target 100 mengindikasikan bahwa proses pengelolaan kinerja telah berjalan efisien, dimana output yang dihasilkan sebanding dengan input yang digunakan.

b. Optimalisasi Proses Internal

   Efisiensi juga tercermin dari optimalnya proses internal organisasi, dimana perencanaan, pelaksanaan program, dan pengendalian kegiatan berjalan selaras. Tidak adanya deviasi antara target dan realisasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal telah berjalan efektif, sehingga

potensi pemborosan sumber daya dapat ditekan dan pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

c. Efisiensi Perencanaan

Kesesuaian antara target kinerja dan realisasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, telah disusun secara realistis dan berbasis kapasitas organisasi. Hal ini berdampak pada tercapainya target tanpa memerlukan penyesuaian signifikan di tengah pelaksanaan, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien.

d. Proses Bisnis dan Inovasi

Efisiensi juga didukung oleh perbaikan proses bisnis dan inovasi dalam pelaksanaan program, termasuk peningkatan koordinasi antar unit kerja, penyederhanaan prosedur kerja, serta pemanfaatan sistem informasi. Hal ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas tata kelola kinerja organisasi secara keseluruhan.

Analisis Efektivitas

Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, tercermin dari realisasi kinerja sebesar 100 yang mencapai target 100, dengan tingkat efektivitas sebesar 103,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan secara optimal sesuai target yang direncanakan.

a. Capaian Memenuhi Target Tahunan

Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 berhasil direalisasikan sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target yang direncanakan, sehingga tingkat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikategorikan sangat efektif.

b. Konsistensi Pencapaian Kinerja

Capaian yang sesuai target mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah berjalan secara sinergis, terarah, dan sesuai rencana yang ditetapkan.

c. Efektivitas Implementasi Program

Keberhasilan pencapaian target menunjukkan bahwa program dan

kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, intervensi dan kebijakan yang dilakukan dapat dinilai efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

d. Tingkat Efektivitas Kinerja

Tingkat efektivitas sebesar 103,96% menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan telah mencapai target secara penuh dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil (*result oriented*), serta optimalisasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

3. Analisis kinerja Tujuan 2: "**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**"

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai 100,14% dan termasuk predikat "Sangat Tinggi" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)	78,37	77,91	79,26	79,26	79,30	79,41	100,14	80,04	99,21

Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 disampaiakan melalui surat Inspektorat Daerah Kabupaten Demak Nomor 700/010/WIL III/Evaluasi/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 79,41 dengan predikat kinerja "BB" (Sangat Baik).

Hasil evaluasi kinerja untuk indikator yang diukur menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2025. Berdasarkan data realisasi historis, kinerja mengalami fluktuasi namun cenderung stabil dan menunjukkan perbaikan

pada periode terakhir. Pada tahun 2021 realisasi tercatat sebesar 78,37, kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 77,91. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 79,26 dan nilai tersebut tetap terjaga hingga tahun 2024 sebesar 79,26. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kinerja telah berjalan cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 79,30. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 79,41. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100,14%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan (di atas 100%) dengan kategori "Sangat Baik". Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang dilaksanakan telah berjalan efektif serta mampu menjaga konsistensi kualitas kinerja, meskipun peningkatan yang dicapai relatif tipis.

Jika dilihat dari tren perkembangan tahun 2021 hingga 2025, kinerja indikator ini menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara moderat. Penurunan pada tahun 2022 berhasil diatasi pada tahun-tahun berikutnya dengan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023, kemudian stabil pada 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas capaian kinerja meskipun ruang peningkatan (improvement space) semakin terbatas.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir rencana (tahun 2026) sebesar 80,04, realisasi tahun 2025 sebesar 79,41 menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai sekitar 99,21% dari target akhir tersebut. Hal ini menandakan bahwa posisi kinerja saat ini sudah sangat dekat dengan target jangka menengah yang ditetapkan. Untuk mencapai target tahun 2026, masih terdapat selisih (gap) sebesar 0,63 poin yang perlu dipenuhi. Dengan mempertimbangkan tren kinerja yang stabil dan capaian yang konsisten melampaui target tahunan, target akhir tersebut dinilai realistis untuk dicapai melalui optimalisasi program yang ada serta inovasi berkelanjutan dalam peningkatan kinerja.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60	24	**24,60**
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,40	23,40	**23,40**
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,26	11,85	**11,40**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20	20,00	**20,00**
	Total Nilai	**100%**	**79,26**	**79,26**	**79,41**
	Predikat Penilaian		BB	BB	BB

Hasil penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2025 total nilai yang diperoleh adalah sebesar 79,41 dengan predikat “BB”. Capaian ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing sebesar 79,26. Meskipun peningkatan yang terjadi relatif kecil (0,15 poin), hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Ditinjau dari masing-masing komponen, Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% menunjukkan kinerja yang stabil dan optimal. Nilai pada tahun 2025 sebesar 24,60 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (24,00) dan kembali pada posisi yang sama seperti tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas, termasuk dalam penyusunan indikator dan target yang lebih terukur.

Pada komponen Pengukuran Kinerja (bobot 30%), nilai yang diperoleh pada tahun 2025 tetap sebesar 23,40, sama dengan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten, meskipun belum menunjukkan adanya inovasi atau peningkatan signifikan dalam metode maupun kualitas pengukuran.

Komponen Pelaporan Kinerja (bobot 15%) mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 11,40 dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,85, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (11,26). Penurunan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek penyajian, kelengkapan, maupun kualitas informasi dalam laporan kinerja agar lebih informatif dan akuntabel.

Sementara itu, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot

25%) menunjukkan nilai yang stabil sebesar 20,00 selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025). Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan evaluasi internal telah berjalan secara konsisten, namun belum mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek tindak lanjut hasil evaluasi dan pemanfaatannya untuk perbaikan kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara marginal. Komponen perencanaan menjadi faktor pendorong utama peningkatan nilai, sementara komponen pelaporan menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk meningkatkan nilai secara signifikan di masa mendatang, diperlukan inovasi dan penguatan terutama pada aspek pelaporan dan evaluasi internal, sehingga tidak hanya menjaga konsistensi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Sebagai perbandingan perolehan nilai SAKIP di 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Nilai SAKIP di 41 Perangkat Daerah Kabupaten Demak

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai SAKIP
1	INSPEKTORAT	87,01
2	DINKESDA	84,15
3	BKPSDM	83,35
4	DINKOMINFO	83,9
5	BPKPAD	82,25
6	SETDA	82,25
7	DINDIKBUD	81,8
8	DINPMPTSP	81,75
9	DINDAGKOP	81,45
10	DINDUKCAPIL	80,76
11	DINPORA	80,45
12	DINPERP.USAR	80,25
13	DINHUB	79,71
14	DINPARTA	79,56
15	DINLUTKAN	79,41
16	BAKESBANGPOL	79,26
17	DINSOS P2PA	79,1
18	BAPPERIDA	78,76
19	DINPERKIM	78,6
20	DINPERMADES P2KB	78,35
21	DINNAKERIND	78,2
22	SATPOL PP	78,2
23	DINLH	78,11

24	DINPERTAN	78
25	BPBD	77,9
26	SETWAN	77,75
27	DINPUTARU	76,85
28	KEC KARANGTENGAH	76,05
29	KEC MIJEN	75,75
30	KEC BONANG	74,25
31	KEC WEDUNG	73,6
32	KEC DEMAK	72,75
33	KEC GAJAH	71,85
34	KEC MRANGGEN	71,51
35	KEC GUNTUR	70,11
36	KEC KARANGAWEN	70,1
37	KEC KARANGANYAR	69,8
38	KEC KEBONAGUNG	69,65
39	KEC DEMPET	68,2
40	KEC WONOSALAM	67,6
41	KEC SAYUNG	66,5

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Demak

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kelautan dan Perikanan (DINLUTKAN) memperoleh nilai SAKIP sebesar 79,41. Capaian tersebut melampaui nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah, yang secara umum berada pada rentang nilai menengah (70–79), serta menempatkan DINLUTKAN pada peringkat ke-15 dari 41 Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah berjalan cukup baik dan konsisten, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP DINLUTKAN juga berada di atas sebagian besar perangkat daerah lainnya, termasuk sejumlah perangkat daerah teknis dan kewilayahan, yang mengindikasikan bahwa tata kelola kinerja sektor kelautan dan perikanan telah diterapkan secara lebih terstruktur dan terukur.

Apabila dibandingkan dengan perangkat daerah dengan nilai tertinggi seperti Inspektorat (87,01), Dinas Kesehatan Daerah (84,15), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (83,90), nilai SAKIP DINLUTKAN masih memiliki ruang peningkatan, khususnya pada penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja (*outcome*). Namun demikian, capaian nilai 79,41 telah mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi SAKIP yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Perangkat

Daerah.

Dengan capaian tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada kelompok Perangkat Daerah dengan kinerja akuntabilitas kategori “Baik”, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penyempurnaan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan indikator kinerja *outcome* dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan manajerial.

a. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) **Penerapan RTP (Rencana Tindak Pengendalian)**

Pelaksanaan evaluasi rutin terhadap efektivitas RTP memberikan ruang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Evaluasi ini dilakukan secara periodik dengan membandingkan antara rencana pengendalian dan realisasi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi pengendalian risiko, termasuk penyesuaian indikator kinerja dan metode pelaksanaan kegiatan

2) **Rekomendasi**

Pencermatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Bapperida Kabupaten Demak utamanya dalam pemanfaatan aplikasi e-sakip secara tertib setiap bulannya untuk memastikan adanya “*continuous monitoring*” beserta respon actual perbaikan kinerja

3) **Monitoring dan evaluasi berkala**

monitoring yang terstruktur dan terjadwal secara periodik (bulanan, triwulanan, hingga tahunan), sehingga setiap capaian kinerja dapat dipantau secara konsisten dan berkelanjutan. Pola ini memungkinkan deteksi dini terhadap deviasi antara target dan realisasi, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2025.

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemanfaatan Pohon Kinerja dalam menyusun rumusan perencanaan kinerja belum optimal

2) **Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

adanya catatan perbaikan dalam implementasi manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja AKIP yaitu penyelarasan target pada perjanjian kinerja perubahan 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Eselon II dengan aplikasi e-SAKIP pada indikator Nilai SAKIP

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

a) **Perencanaan Kinerja**

Mendorong integrasi Pohon Kinerja ke dalam seluruh dokumen perencanaan, mulai dari Renstra, Renja, hingga Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, setiap indikator kinerja yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kontribusi terhadap sasaran strategis organisasi dan tidak bersifat parsial. Melakukan reviu internal secara berkala terhadap kualitas Pohon Kinerja yang telah disusun. Reviu ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antar level kinerja (organisasi, bidang, hingga individu), serta menghindari duplikasi atau indikator yang tidak relevan.

b) **Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Melakukan penelaahan ulang terhadap target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan mengacu kepada capaian kinerja terkini, dan standar penilaian SAKIP yang berlaku. Melakukan penyelarasan dan perbaikan terhadap target indikator Nilai SAKIP di aplikasi e-SAKIP, guna memastikan target yang ditetapkan realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan organisasi serta kinerja instansi;

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) Implementasi dan optimalisasi aplikasi e-SAKIP

Implementasi dan optimalisasi aplikasi e-SAKIP merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja secara sistematis dan berbasis data. Melalui pemanfaatan e-SAKIP, setiap unit kerja dapat memastikan bahwa indikator kinerja, target, serta realisasi yang diinput telah selaras dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Optimalisasi e-SAKIP dilakukan melalui penguatan kualitas data dan konsistensi pelaporan antar level organisasi, sehingga tidak terjadi perbedaan antara dokumen manual dengan sistem aplikasi. Selain itu, pemanfaatan fitur monitoring dalam e-SAKIP memungkinkan pimpinan untuk melakukan pengawasan secara real time terhadap capaian kinerja, sekaligus mengidentifikasi secara dini potensi deviasi yang memerlukan tindak lanjut. Hal ini menjadikan proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

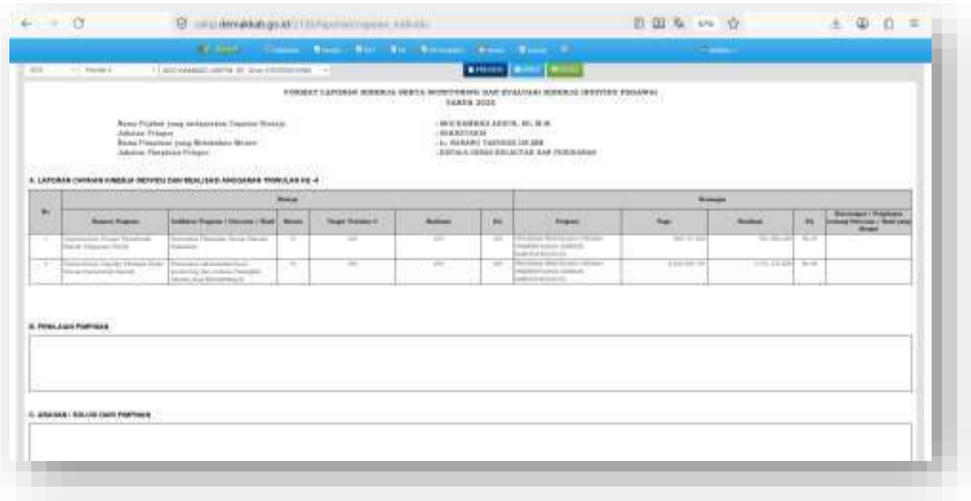

Gambar 3.9 Aplikasi e-Sakip

2) Monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala.

Bagian dari siklus manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaan monitoring dilakukan secara periodik, baik bulanan maupun triwulanan, melalui pengumpulan dan analisis data capaian indikator kinerja dari seluruh unit kerja. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan, mengukur kesesuaian antara target dan

realisasi, serta mendeteksi secara dini adanya deviasi atau kendala yang beRp.otensi menghambat pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, langkah-langkah korektif dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat waktu.

Gambar 3.10 Laporan Monev Triwulan IV 2025 dan BA Monev

3) Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Evaluasi yang dilakukan Inspektorat menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan yang berfokus pada penyempurnaan implementasi manajemen kinerja, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Pelaksanaan tindak lanjut juga dilakukan melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, khususnya dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja agar lebih konsisten dan selaras. Selain itu, dilakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan sasaran strategis organisasi. Proses ini turut didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kinerja seperti e-SAKIP, sehingga memudahkan dalam pemantauan progres serta meningkatkan akurasi data.

Gambar 3.11 Laporan LHE SAKIP DINLUTKAN dan Tindak Lanjut LHE

Pada Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.422.095.767 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.731.152.839 atau mencapai 84,38%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik dan sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, masih terdapat selisih anggaran sekitar 15,62% yang belum terserap, yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kegiatan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program utama dalam menunjang kinerja organisasi. Program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, melalui pelaksanaan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, administrasi perkantoran, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan kinerja. Dengan dukungan program ini, proses manajemen kinerja dapat berjalan secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP dan kualitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Nilai Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Nilai SAKIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	79,30	79,41	100,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.422.095.767	3.731.152.839	**84,38**
	Capaian					**100,14**	**Jumlah**	**4.422.095.767**	**3.731.152.839**	**84,38**
TINGKAT EFISIENSI: 15,76										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 118,68										

Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam konteks SAKIP dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan outcome kinerja yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya/kapasitas birokrasi yang tersedia secara optimal. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja sebesar 79,41 dari target 79,30 dengan tingkat efisiensi sebesar 15,76 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan terkendali.

a. Keunggulan Komparatif (Efisiensi Relatif)

   Menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang tersedia (SDM, anggaran, dan sistem), perangkat daerah mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian sebesar 79,41 yang sedikit lebih tinggi dari target 79,30 mengindikasikan bahwa proses pengelolaan kinerja telah berjalan efisien, dimana output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan input yang digunakan.

b. Optimalisasi Proses Internal

   Efisiensi juga tercermin dari optimalnya proses internal organisasi, dimana perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras. Minimnya deviasi antara target dan realisasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal telah berjalan efektif, sehingga potensi pemborosan sumber daya dapat ditekan dan pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

c. Efisiensi Perencanaan

   Kesesuaian antara target kinerja dan realisasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) telah

disusun secara realistis dan berbasis kapasitas. Hal ini berdampak pada tercapainya kinerja tanpa memerlukan penyesuaian signifikan di tengah pelaksanaan, sehingga proses menjadi lebih efisien.

d. Proses Bisnis dan Inovasi

Efisiensi juga didukung oleh perbaikan proses bisnis dan inovasi dalam pelaksanaan program, termasuk peningkatan koordinasi antar unit kerja dan pemanfaatan sistem informasi. Hal ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan.

Analisis Efektivitas

Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, tercermin dari realisasi kinerja sebesar 79,41 yang melampaui target 79,30, dengan tingkat efektivitas sebesar 118,68%.

a. Capaian Melampaui Target TahunanTarget kinerja yang ditetapkan sebesar 79,30 berhasil direalisasikan sebesar 79,41. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan, sehingga tingkat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikategorikan sangat efektif.
b. Konsistensi Pencapaian Kinerja Capaian yang melampaui target mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah berjalan secara sinergis dan terarah.
c. Efektivitas Implementasi Program Keberhasilan pencapaian target menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat dikatakan efektif dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.
d. Tingkat Efektivitas Kinerja Tingkat efektivitas sebesar 118,68% menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan hasil yang lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil

(*result oriented*), serta optimalisasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

4. Analisis kinerja **Sasaran 2**: **"Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan"**

   Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target mencapai 83,33% dan termasuk predikat "Tinggi" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mencapai Target

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikana yang mencapai target (%)	100	100	100	100	100	83,33	83,33	100	83,33

Untuk menghitung persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Indikator Mencapai Target} = \left(\frac{\text{Jumlah Indikator yang Mencapai Target}}{\text{Total Jumlah Indikator}}\right) \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel, capaian indikator kinerja menunjukkan tren yang stabil pada periode tahun 2021 hingga 2024, dimana realisasi secara konsisten berada pada angka 100% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut kinerja indikator mampu dipertahankan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan sebesar 100%, namun realisasi hanya mencapai 83,33%, sehingga persentase capaian juga berada pada angka 83,33%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 100%, maka terjadi penurunan sebesar 16,67 poin.

Penurunan capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan kondisi yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja indikator, dimana terjadi penurunan realisasi secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif stabil. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak tercapainya Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, karena penurunan capaian indikator turut menurunkan tingkat keberhasilan sasaran secara keseluruhan. Penurunan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya produksi perikanan tangkap, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi cuaca ekstrem yang membatasi aktivitas melaut, pendangkalan di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menghambat proses pendaratan hasil tangkapan, serta kecenderungan nelayan menjual hasil tangkapan di luar daerah sehingga tidak tercatat dalam wilayah. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana penangkapan, meningkatnya biaya operasional, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi juga turut mempengaruhi produktivitas nelayan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan yang lebih terarah agar kinerja dapat kembali stabil dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal pada periode berikutnya.

Dengan demikian, meskipun kinerja pada periode 2021–2024 tergolong sangat baik dan konsisten, capaian tahun 2025 menjadi perhatian khusus karena menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terarah agar capaian kinerja dapat kembali optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

a. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) **Perencanaan Berbasis Kinerja dan Data**

Perencanaan kinerja tahun 2025 telah mengadopsi pendekatan perencanaan berbasis data dan fakta dengan memanfaatkan data historis capaian kinerja, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta analisis kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa target yang ditetapkan tidak bersifat normatif, melainkan terukur dan realistis. Selain itu, integrasi antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) menunjukkan konsistensi arah kebijakan.

2) **Keterkaitan Program terhadap *Outcome***

Penguatan *cascading* kinerja dari level strategis hingga operasional memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan

nilai tambah terhadap pencapaian sasaran. Hal ini tercermin dari meningkatnya indikator *outcome* seperti produksi perikanan, nilai tambah hasil olahan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Kinerja organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghasilkan dampak nyata.

3) **Penguatan Monitoring dan Evaluasi**

Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam melakukan penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya. Tingginya tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga kualitas kinerja.

4) **Sinergi dan Kolaborasi**

Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program. Kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan akademisi memungkinkan optimalisasi sumber daya dan perluasan cakupan program. Melalui pendekatan kolaboratif, pelaksanaan program menjadi lebih efisien karena mengurangi duplikasi kegiatan dan meningkatkan *leverage* terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, kolaborasi juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan program.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) **Target kinerja yang cukup tinggi dibanding kapasitas riil sumber daya dan anggaran**

Penetapan target kinerja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan dan percepatan pencapaian sasaran strategis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakseimbangan antara target yang ditetapkan dengan kapasitas riil organisasi, baik dari sisi ketersediaan anggaran, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, maupun dukungan sarana prasarana. Kondisi ini menyebabkan beberapa program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai skala kebutuhan. Akibatnya, meskipun upaya pelaksanaan kegiatan telah dilakukan, hasil yang

dicapai belum sepenuhnya mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

2) **Dampak faktor eksternal, seperti cuaca ekstrem, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi ekonomi Masyarakat**

   Sebagian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor di luar kendali organisasi. Kondisi cuaca ekstrem, gelombang tinggi, curah hujan yang tinggi, serta perubahan musim berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga produksi tidak berjalan normal. Selain itu, fluktuasi harga komoditas perikanan dan kenaikan biaya produksi seperti pakan, BBM, benih, dan logistik turut menekan pendapatan pelaku usaha. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi daya beli terhadap produk perikanan, sehingga beRp.engaruh terhadap rantai usaha dan pencapaian indikator sektor kelautan dan perikanan.

3) **Keterbatasan sarana prasarana pendukung program prioritas**

   Keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun pada Tahun 2025 masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), akses jalan menuju sentra produksi, armada operasional lapangan, sarana budidaya, serta peralatan pengolahan hasil perikanan. Sebagian sarana yang tersedia juga memerlukan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas. Keterbatasan tersebut menyebabkan efektivitas program belum maksimal, distribusi hasil usaha kurang efisien, dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

4) **Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya**

   Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya pada dasarnya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan, baik terkait penguatan program prioritas, penyempurnaan indikator kinerja, peningkatan koordinasi, maupun perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Namun demikian, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut belum seluruhnya dapat diimplementasikan secara maksimal pada Tahun 2025. Beberapa perbaikan masih memerlukan proses penyesuaian kebijakan, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas bidang dan lintas instansi. Akibatnya, sejumlah permasalahan yang sama masih berulang dan mempengaruhi capaian kinerja tahun berjalan.

5) **Pelaksanaan kegiatan lebih berorientasi output dibanding outcome, sehingga capaian administrasi baik namun dampak indikator belum signifikan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagian capaian masih terfokus pada penyelesaian target administratif seperti jumlah kegiatan terlaksana, jumlah peserta pelatihan, jumlah bantuan yang disalurkan, atau tingkat realisasi anggaran. Meskipun indikator output tersebut menunjukkan hasil yang baik, namun belum seluruhnya diikuti dengan perubahan nyata terhadap indikator outcome, seperti peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan pelaku usaha, peningkatan nilai tambah produk, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi hasil agar setiap kegiatan tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) **Melakukan penajaman target kinerja agar lebih realistis dan terukur**

Target indikator kinerja perlu disusun berdasarkan baseline data yang akurat, tren capaian tahun sebelumnya, kapasitas anggaran, serta kemampuan riil organisasi. Dengan demikian, target yang ditetapkan tetap menantang namun realistis untuk dicapai dan dapat menjadi alat ukur kinerja yang objektif;

2) **Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja**

Setiap program dan kegiatan perlu dipastikan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Penyusunan anggaran harus diarahkan pada kegiatan prioritas yang berdampak nyata terhadap indikator kinerja, sehingga prinsip money follow program dapat diterapkan secara optimal;

3) **Meningkatkan koordinasi lintas bidang dan lintas sektor**

Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan kawasan pesisir, dan pengembangan usaha perikanan;

4) **Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala**
Pemantauan capaian indikator perlu dilakukan secara triwulanan atau semesteran agar permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal. Dengan monitoring yang rutin, perangkat daerah dapat segera mengambil langkah korektif terhadap indikator yang berpotensi tidak tercapai.

5) **Meningkatkan kualitas data kinerja dan sistem pelaporan**
Perlu penguatan sistem pendataan sektor kelautan dan perikanan melalui digitalisasi pelaporan, validasi data lapangan, dan integrasi data antarbidang. Data yang akurat dan tepat waktu akan mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran;

6) **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha**
Perlu dilaksanakan pelatihan secara berkelanjutan bagi ASN, penyuluh, nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan terkait manajemen usaha, teknologi produksi, pemasaran digital, pengelolaan data, serta implementasi SAKIP berbasis hasil;

7) **Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana pendukung sektor kelautan dan perikanan**
Pemerintah daerah perlu memprioritaskan rehabilitasi dan pembangunan sarana strategis seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *cold storage*, sarana budidaya, akses jalan sentra produksi, serta fasilitas pengolahan hasil perikanan;

8) **Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi daerah**
Penggunaan teknologi informasi, aplikasi pendataan produksi, sistem informasi cuaca, pemasaran digital, dan inovasi pengolahan hasil perikanan perlu diperluas untuk meningkatkan efisiensi usaha dan produktivitas sektor;

9) **Menguatkan orientasi *outcome* dalam pelaksanaan program**
Setiap kegiatan tidak hanya berfokus pada penyelesaian output administratif, tetapi harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap peningkatan produksi, pendapatan masyarakat, nilai tambah hasil perikanan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir;

10) **Mempercepat tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi tahun sebelumnya**
Seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal perlu ditindaklanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang jelas,

penanggung jawab yang terukur, dan batas waktu penyelesaian yang pasti;

11) **Meningkatkan dukungan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sektor perikanan**

Perlu penguatan akses permodalan, bantuan sarana produksi, pendampingan usaha, sertifikasi produk, dan perluasan pasar agar daya saing nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan semakin meningkat;

12) **Membangun mitigasi terhadap risiko eksternal**

Perlu strategi adaptasi terhadap cuaca ekstrem, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan gangguan ekonomi melalui diversifikasi usaha, penguatan cadangan produksi, serta peningkatan informasi pasar bagi pelaku usaha.

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2025

1) **Sinergi dan Komitmen Pimpinan (Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen)**

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, perlu dilakukan penguatan sinergi dan komitmen pimpinan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas sampai pejabat struktural dan pelaksana terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan target kinerja antara pimpinan dan unit kerja, serta mendorong tanggung jawab bersama dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, komitmen pimpinan juga diwujudkan melalui rapat koordinasi internal, pembinaan rutin, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas.

Gambar 3.12 Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen

2) **Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak**

Monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran serta pengumpulan data kinerja perlu dilaksanakan secara berkala agar capaian indikator dapat dipantau secara tepat waktu dan akurat. Kegiatan ini mencakup verifikasi data dari masing-masing bidang, validasi data lapangan, konsolidasi laporan capaian kinerja, serta evaluasi kesesuaian antara target dan realisasi. Dengan sistem monitoring yang baik, hambatan dalam pencapaian kinerja dapat segera diketahui dan dilakukan langkah perbaikan secara cepat dan terukur.

Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Struktural,
Pelaksana, Fungsional dan Penyuluh dalam evaluasi kinerja kegiatan

3) **Meningkatkan dukungan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sektor perikanan**

Upaya peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan perlu didukung melalui penguatan peran pelaku utama, seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan. Bentuk dukungan dapat berupa fasilitasi akses permodalan, bantuan sarana produksi, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan akses pemasaran. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, produktivitas dan daya saing pelaku usaha akan meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan.

4) **Sinkronisasi program/ kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja**

Setiap program dan kegiatan yang direncanakan perlu diselaraskan dengan sasaran strategis serta indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan. Sinkronisasi ini dilakukan melalui proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada prioritas pembangunan sektor kelautan dan

perikanan. Dengan keterpaduan antara program dan target kinerja, pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan capaian sasaran strategis tahun 2025.

Gambar 3.14 Sinkronisasi program/ kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja Daerah

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.422.095.767 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.731.152.839 atau mencapai 84,38%. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik dan sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar 15,62% yang belum terserap, yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kegiatan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program utama dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta mendukung kelancaran operasional organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup perencanaan, penganggaran, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. Dengan dukungan program ini, proses manajemen pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelautan dan Perikanan yang mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mencapai Target dicapai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis yang mencapai target	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mencapai target	%	100	83,33	83,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.422.095.767	3.731.152.839	**84,38**
	Capaian					83,33	Jumlah	4.422.095.767	3.731.152.839	**84,38**
TINGKAT EFISIENSI: -1,05										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 83,33										

Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam konteks pencapaian kinerja dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam menghasilkan output dan outcome secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya, anggaran, serta kapasitas birokrasi yang tersedia secara tepat guna. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja sebesar 83,33 dari target 100, dengan tingkat efisiensi sebesar -1,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya mampu menghasilkan kinerja sesuai target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan input organisasi.

a) Keunggulan Komparatif (Efisiensi Relatif)

Menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang tersedia, baik SDM, anggaran, maupun sistem pendukung, perangkat daerah telah mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 83,33%. Namun demikian, hasil tersebut masih berada di bawah target 100%, sehingga mengindikasikan bahwa output yang dihasilkan belum sebanding secara optimal dengan input yang telah digunakan.

b) Optimalisasi Proses Internal

Efisiensi juga berkaitan dengan kualitas proses internal organisasi, dimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program harus berjalan selaras. Adanya deviasi antara target dan realisasi menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi, sehingga potensi inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalkan.

c) Efisiensi Perencanaan

Perbedaan antara target kinerja dan realisasi menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, masih perlu disempurnakan agar lebih realistis dan berbasis kapasitas aktual organisasi. Perencanaan yang lebih akurat akan berdampak pada penetapan target yang terukur dan lebih mudah dicapai, sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih efisien.

d) Proses Bisnis dan Inovasi

Efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan proses bisnis dan inovasi dalam pelaksanaan program, termasuk peningkatan koordinasi antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Analisis Efektivitas

Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan realisasi kinerja sebesar 71,43 dari target 100, dengan tingkat efektivitas sebesar 84,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup baik, meskipun target kinerja belum sepenuhnya tercapai.

a) Capaian terhadap Target Tahunan

Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 berhasil direalisasikan sebesar 71,43. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target yang direncanakan telah tercapai, meskipun masih terdapat selisih sebesar 28,57 yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pada periode berikutnya.

b) Konsistensi Pencapaian Kinerja

Realisasi kinerja sebesar 83,33 mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah dilaksanakan secara terarah, walaupun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek agar target dapat tercapai sepenuhnya.

c) Efektivitas Implementasi Program

Capaian kinerja yang mencapai lebih dari tujuh puluh persen menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, meskipun masih memerlukan optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

d) Tingkat Efektivitas Kinerja

Tingkat efektivitas sebesar 83,33% menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai telah berada pada kategori baik, namun belum maksimal sesuai target yang direncanakan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar pencapaian sasaran strategis pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

5. Analisis kinerja Tujuan 3: "**Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan**"

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan dengan indikator LPE Sub kategori perikanan belum dapat diketahui karena data belum dirilis oleh BPS.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun

LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai PDRB berasal dari data yang

dirilis oleh BPS. Subkategori perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea, mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data utama untuk menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan adalah volume produksi tangkap dan budidaya per komoditas (Ton), dikalikan harga konstan tahun dasar BPS untuk estimasi Nilai Tambah Bruto (NTB). NTB dihitung sebagai *output* produksi dikurangi biaya antara (bahan bakar, pakan, tenaga kerja), dengan LPE dari persentase perubahan NTB antaRp.eriode atas harga konstan. Data Produksi Utama Perikanan tangkap: Volume ikan laut (Tongkol, layang, tuna), perairan umum/ darat (Ton). Perikanan budidaya: Produksi nila, lele, patin, udang, rumput laut, kakap (Ton); dibedakan laut, tambak, keramba.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari BPS dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Untuk mengukur nilai LPE digunakan rumus sebagai berikut:

$$LPE(PKP) = \frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} x100\%$$

Ket: PDRB atas dasar harga konstan

t = tahun berjalan;

t-1 = tahun sebelumnya

PKP = Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan

perekonomian sektor perikanan belum dapat disajikan hingga laporan ini disusun terkait BPS Kabupaten Demak selaku produsen data LPE Kategori Perikanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
LPE Sub kategori perikanan (%)	4,63	7,45	5,24	5,66	5,67	0,74	13,05	4,93	15,01

Sumber: Data BPS Kab. Demak 2022-2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, perkembangan capaian indikator kinerja menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022–2025. Pada tahun 2022 realisasi tercatat sebesar 7,45, kemudian mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2023 menjadi 5,24, yang mengindikasikan adanya tekanan atau kendala dalam pencapaian kinerja pada periode tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi perbaikan dengan capaian sebesar 5,66, meskipun belum mampu kembali ke posisi tahun 2022. Memasuki tahun 2025, target yang ditetapkan relatif stagnan di angka 5,67, namun realisasi hingga periode pelaporan baru mencapai 0,74 atau sebesar 13,05%, yang menunjukkan bahwa progres capaian masih sangat rendah dan berada pada kategori sangat rendah (≤50%).

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 4,93, maka capaian saat ini baru mencapai 15,01%, sehingga masih terdapat kesenjangan (gap) yang cukup besar antara kondisi aktual dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian pada tahun berjalan ini dapat mengindikasikan adanya faktor penghambat seperti belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan pada awal tahun, atau belum maksimalnya kontribusi indikator pendukung. Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan sinergi antar program agar capaian indikator kinerja dapat meningkat secara signifikan dan tetap berada pada jalur pencapaian target Renstra tahun 2026. Perkembangan LPE kategori Perikanan Kabupaten Demak dapat kita sajikan pada grafik berikut ini:

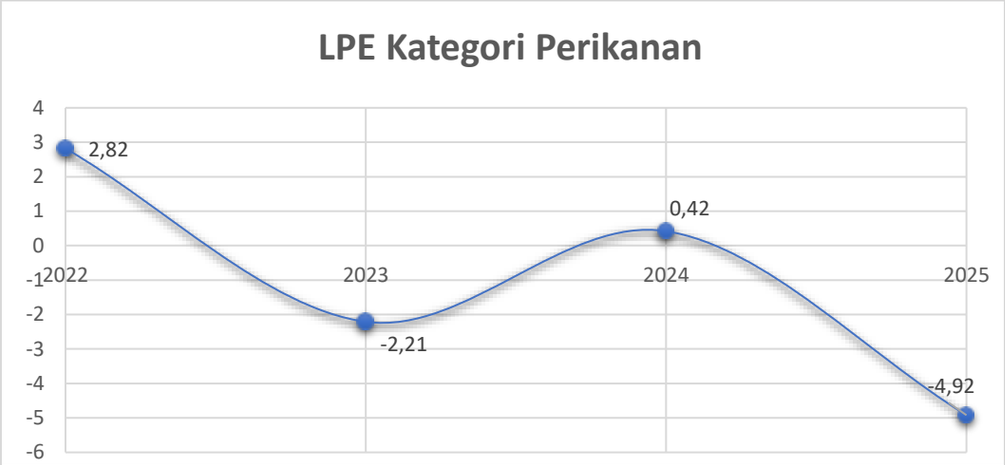

Gambar 3.15 Grafik LPE Kategori Perikanan

Berdasarkan data realisasi selama beberapa tahun terakhir, nilai LPE Sub Kategori Perikanan Kabupaten Demak menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi LPE tercatat sebesar **4,63%**, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi **7,45%**. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi **5,24%**, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar **5,66%**. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar **5,67%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **0,74%** sehingga capaian kinerja terhadap target tahun berjalan sebesar **13,05%**. Jika dibandingkan dengan **target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 4,93%**, maka capaian indikator pada tahun 2025 baru mencapai **15,01%** dari target akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **LPE Subkategori Perikanan Kabupaten Demak pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,74%**. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa daerah pesisir lain di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, seperti **Kabupaten Pati**, **Kabupaten Jepara**, dan **Kabupaten Rembang**, yang secara umum memiliki pertumbuhan sektor perikanan yang lebih tinggi.

Apabila dibandingkan dengan LPE sektor perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 5,28%, capaian Kabupaten Demak sangat rendah sekitar 4,53 poin persentase. Demikian pula bila dibandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada kisaran 4,95%, LPE sektor perikanan Kabupaten Demak menunjukkan kinerja yang kurang kompetitif dan berkontribusi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Demak pada tahun 2025 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Pantura. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi

aktivitas produksi dan pencatatan hasil perikanan di daerah.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja LPE Sektor Perikanan adalah :

1) Produktivitas perikanan tangkap

- modernisasi armada dan alat tangkap yang digunakan nelayan, sehingga mampu menjangkau daerah penangkapan yang lebih luas dan meningkatkan hasil tangkapan.
- efisiensi operasional, khususnya dalam penggunaan bahan bakar (BBM) dan pengelolaan logistik melaut, turut berperan dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan nelayan
- dukungan akses terhadap informasi daerah penangkapan ikan juga menjadi faktor penting agar nelayan dapat menentukan lokasi tangkap yang potensial secara lebih tepat
- peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknis, baik dalam penggunaan alat tangkap, navigasi, maupun manajemen usaha, akan mendorong profesionalisme dan efektivitas kegiatan penangkapan

2) Produktivitas perikanan budidaya

- penggunaan benih unggul dan berkualitas yang mampu tumbuh optimal serta tahan terhadap penyakit
- ketersediaan dan stabilitas pakan menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan atau udang
- Penerapan teknologi budidaya yang lebih maju, seperti sistem semi intensif maupun intensif, turut mendorong peningkatan produktivitas melalui efisiensi pemeliharaan dan optimalisasi hasil panen
- sinergi dari berbagai faktor tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya

3) Kelembagaan pelaku usaha

- Penguatan kelompok nelayan dan pembudidaya menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha, serta posisi tawar pelaku usaha di pasar
- Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha akan mendorong terciptanya sinergi dalam kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan
- Peran koperasi dan kelembagaan ekonomi perikanan juga menjadi

penting dalam mengelola usaha secara kolektif, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses pasar

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja LPE Sektor Perikanan adalah:

1) **Pendangkalan pada area Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**
menyebabkan aktivitas pendaratan hasil tangkapan nelayan menjadi kurang optimal. Kondisi pendangkalan tersebut menghambat kapal nelayan untuk bersandar dan melakukan proses bongkar muat hasil tangkapan secara maksimal, sehingga volume ikan yang didaratkan dan dilelang di wilayah Kabupaten Demak mengalami penurunan.

2) **Penjualan hasil tangkapan nelayan di luar wilayah Kabupaten Demak**
Sebagian nelayan memilih menjual hasil tangkapan mereka di daerah lain yang memiliki fasilitas pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan yang lebih memadai. Akibatnya, produksi ikan yang sebenarnya dihasilkan oleh nelayan Kabupaten Demak tidak seluruhnya tercatat dalam sistem pencatatan produksi daerah karena proses transaksi dan pelelangan dilakukan di luar wilayah administrasi Kabupaten Demak.

3) **Musiman dan cuaca ekstrem**
Pada awal tahun umumnya terjadi gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi yang membatasi jumlah hari melaut (*fishing days*), sehingga berdampak langsung pada menurunnya volume hasil tangkapan nelayan.

4) **Rendahnya produktivitas armada dan alat tangkap**
Sebagian besar nelayan masih menggunakan armada skala kecil dengan teknologi terbatas, sehingga jangkauan penangkapan sempit dan hasil tangkapan tidak maksimal.

5) **Belum optimalnya pencatatan produksi perikanan (*underreporting*)**
Selain karena penjualan di luar daerah, juga terdapat praktik pendaratan ikan di lokasi *non-resmi* yang tidak tercatat dalam sistem statistik daerah, sehingga realisasi kinerja terukur lebih rendah dari kondisi riil di lapangan.

6) **Permasalahan kualitas lingkungan perairan dan budidaya**
Penurunan kualitas air tambak, serangan penyakit, serta fluktuasi salinitas yang berdampak pada menurunnya produktivitas perikanan budidaya.

7) **Rendahnya kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi**
Perizinan usaha, pelaporan hasil produksi, serta penggunaan alat tangkap yang belum sesuai ketentuan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi aspek legalitas, tetapi juga berdampak pada validitas data kinerja sektor.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja LPE Sektor Perikanan

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menjaga Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan adalah:

1) Dilakukan normalisasi dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melalui pengerukan area yang mengalami pendangkalan serta peningkatan fasilitas pendukung, sehingga aktivitas pendaratan dan lelang ikan dapat berjalan optimal dan seluruh produksi tercatat di dalam wilayah;
2) Pengendalian arus penjualan hasil tangkapan ke luar daerah melalui perbaikan sistem tata niaga, peningkatan daya saing harga, serta pemberian insentif bagi nelayan agar melakukan pendaratan di TPI lokal;
3) Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya melalui bantuan sarana produksi (alat tangkap, benih unggul, pakan), modernisasi teknologi, serta peningkatan jumlah hari operasional (*fishing days* dan siklus budidaya);
4) Penguatan sektor pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, melalui pembinaan UMKM, diversifikasi produk, serta pengembangan akses pasar;
5) Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan produksi perikanan dengan memastikan seluruh aktivitas produksi, baik di TPI maupun non-TPI, dapat terdokumentasi secara akurat dan terintegrasi sebagai dasar perhitungan PDRB;
6) Penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses permodalan, efisiensi usaha, dan posisi tawar di pasar;
7) Penanganan faktor lingkungan pesisir, seperti pengendalian sedimentasi, perbaikan kualitas air tambak, dan mitigasi dampak cuaca ekstrem, perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas produksi.

Tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan, yang direpresentasikan oleh capaian agregat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan, sangat dipengaruhi dan ditopang secara langsung oleh keberhasilan dua sasaran strategis di bawahnya. Sinergi kedua sasaran ini menciptakan daya ungkit (leverage) bagi perekonomian daerah melalui mekanisme sebagai berikut :

Pertama, pondasi utama pertumbuhan dibangun melalui Sasaran 3: meningkatnya produksi olahan hasil perikanan. Sasaran ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan nilai tambah sektor perikanan melalui penguatan aktivitas pengolahan yang tercermin dari peningkatan volume produksi olahan serta pertumbuhan omzet UKM pengolahan hasil perikanan. Peningkatan kinerja pada sektor hilir ini tidak hanya memperluas peluang pasar, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor perikanan dalam pembentukan PDRB secara lebih optimal.

Kedua, akselerasi pertumbuhan sektor perikanan didorong oleh capaian Sasaran 4: meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, dan kelautan, yang beRp.eran sebagai penggerak utama dari sisi hulu. Peningkatan volume produksi dari kedua subsektor tersebut secara langsung memperbesar kontribusi terhadap pembentukan PDRB sektor perikanan, sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi kegiatan pengolahan. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan, maka semakin besar pula potensi nilai ekonomi yang tercipta, baik melalui penjualan hasil tangkap maupun pengembangan usaha budidaya. Dengan demikian, optimalisasi produksi perikanan menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan sektor perikanan secara keseluruhan dan mendorong peningkatan LPE secara berkelanjutan.

6. Analisis kinerja **Sasaran 3**: **“Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan”**

   Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan (%)	7,77	7,44	8,1	8,6	8,8	8,9	101,14	9	98,89

Berdasarkan data pada tabel tersebut, capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi tercatat sebesar 7,77, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,44. Selanjutnya, kinerja kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 8,1 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 8,6. Memasuki tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 8,8 dan realisasi telah mencapai 8,9 atau sebesar 101,14%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan (*over achievement*).

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator berada pada kategori sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 9, capaian tahun 2025 sudah sangat mendekati target tersebut, sehingga memberikan indikasi positif bahwa target jangka menengah beRp.otensi besar untuk tercapai. Secara keseluruhan, tren peningkatan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan dan konsistensi dalam mendorong pencapaian indikator sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peningkatan omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{(\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \text{x } 100\%$$

Pada Tahun 2025 target volume produksi olahan hasil perikanan sebesar 22.250 Ton, yang berhasil terealisasi sebesar 24.547 Ton atau sebesar 109% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan apabila dibanding dengan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar 22.438 Ton, pencapaian volume produksi olahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar

9,40%. Berdasarkan hasil analisa peningkatan capaian volume produksi olahan hasil perikanan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur klasifikasi produk-produk hasil olahan perikanan.

Tabel 3.17 Jumlah dan nilai Produksi pengolahan hasil perikanan

No	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.)
1	2022	17.630	712.532.679.910
2	2023	20.566	899.706.635.000
3	2024	22.010	963.325.574.000
4	2025	24.547	1.073.975.742.000

Berdasarkan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2022–2025, menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten pada produksi olahan hasil perikanan yang selaras dengan peningkatan omzet UKM pengolahan hasil perikanan. Kondisi ini mencerminkan semakin optimalnya kinerja sektor pengolahan perikanan sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.

Pada Tahun 2022, total produksi olahan hasil perikanan tercatat sebesar 17.630 Ton dengan nilai produksi sebesar Rp.. 712.532.679.910. Capaian ini menjadi baseline kinerja awal penguatan sektor UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Demak.

Selanjutnya pada Tahun 2023, produksi meningkat menjadi 20.566 Ton, atau mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan volume produksi tersebut, nilai produksi juga meningkat menjadi Rp.. 899.706.635.000. Kenaikan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi UKM pengolahan telah berdampak langsung terhadap peningkatan omzet, baik melalui peningkatan jumlah produksi maupun perbaikan kualitas dan daya serap pasar.

Pada Tahun 2024, tren peningkatan kinerja terus berlanjut dengan capaian produksi sebesar 22.010 Ton dan nilai produksi mencapai Rp.. 963.325.574.000. Meskipun laju peningkatan produksi relatif lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, nilai produksi tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai tambah produk olahan, antara lain melalui diversifikasi produk, perbaikan

kemasan, serta perluasan akses pemasaran UKM pengolahan hasil perikanan.

Puncaknya pada Tahun 2025, produksi olahan hasil perikanan mencapai 24.547 Ton, dengan nilai produksi meningkat menjadi Rp. 1.073.975.742.000. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan omzet UKM secara nyata. Nilai produksi yang telah melampaui satu triliun rupiah mencerminkan semakin kuatnya peran UKM pengolahan hasil perikanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Demak.

Secara keseluruhan, data Tahun 2022–2025 menunjukkan adanya hubungan yang searah dan saling menguatkan antara meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dengan peningkatan omzet UKM pengolahan hasil perikanan. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, antara lain fasilitasi sarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku UKM, pendampingan mutu dan keamanan pangan, serta penguatan akses pasar.

a. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan 2025

1) **Peningkatan kapasitas produksi**

   Ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan seperti mesin produksi, freezer, dan peralatan pengemasan mendorong efisiensi serta peningkatan volume produksi, sehingga UKM mampu memenuhi permintaan pasar secara lebih optimal;

2) **Peningkatan keterampilan pelaku usaha**

   Pelatihan teknis, khususnya pengolahan produk perikanan seperti frozen food, meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, dan memiliki nilai tambah lebih tinggi;

3) **Peningkatan kualitas dan daya saing produk**

   Penggunaan bahan baku yang baik, penerapan standar higiene dan keamanan pangan, serta pengemasan yang menarik dan modern mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar;

4) **Diversifikasi produk olahan**

   Pengembangan berbagai jenis produk olahan seperti nugget ikan, bakso ikan, dan produk beku lainnya memberikan pilihan lebih luas bagi konsumen serta meningkatkan peluang penjualan;

5) **Perluasan akses pasar**

Pemanfaatan pemasaran digital, media sosial, serta penetrasi ke pasar modern dan retail memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan volume penjualan produk;

6) **Penguatan kelembagaan usaha**

Keterlibatan dalam kelompok usaha, koperasi, atau kemitraan mempermudah akses terhadap permodalan, bahan baku, serta jaringan pemasaran yang lebih luas;

7) **Dukungan program pemerintah**

Bantuan sarana prasarana, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk (PIRT, halal) meningkatkan legalitas dan daya saing produk di pasar.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan 2025.

1) **Keterbatasan sarana dan prasarana produksi**

Masih banyak UKM yang menggunakan peralatan sederhana sehingga kapasitas produksi terbatas, proses kurang efisien, dan kualitas produk belum konsisten;

2) **Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha**

Rendahnya keterampilan teknis dalam pengolahan, pengemasan, serta manajemen usaha menyebabkan produk kurang inovatif dan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

3) **Keterbatasan akses permodalan**

Sulitnya memperoleh pembiayaan menghambat pengembangan usaha, termasuk dalam peningkatan kapasitas produksi, pembelian peralatan, dan pengembangan produk baru.

4) **Kualitas dan kontinuitas bahan baku**

Ketersediaan bahan baku ikan yang tidak stabil, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, berdampak pada kelancaran produksi dan konsistensi produk.

5) **Rendahnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan**

Sebagian UKM belum memenuhi standar seperti PIRT, halal, atau sertifikasi lainnya, sehingga membatasi akses ke pasar modern dan kepercayaan konsumen.

6) **Keterbatasan inovasi dan diversifikasi produk**
   Produk yang dihasilkan masih monoton dan kurang mengikuti tren pasar, sehingga daya tarik dan nilai tambah produk relatif rendah.
7) **Keterbatasan pemasaran dan akses pasar**
   Minimnya pemanfaatan teknologi digital serta keterbatasan jaringan distribusi menyebabkan jangkauan pemasaran masih sempit dan bergantung pada pasar lokal.
8) **Keterbatasan fasilitas rantai dingin (*cold chain*)**
   Kurangnya fasilitas penyimpanan beku dan distribusi dingin menyebabkan produk tidak tahan lama dan berisiko menurunkan kualitas.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan 2025
   1) penguatan sarana dan prasarana produksi melalui pemberian bantuan peralatan pengolahan, freezer, dan alat pengemasan modern untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan kualitas produk.
   2) peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan teknis pengolahan (termasuk *frozen food*), manajemen usaha, serta pemasaran digital agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar.
   3) Penguatan kualitas dan standar produk melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi seperti PIRT, halal, dan label kemasan, sehingga produk dapat menembus pasar retail modern dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
   4) pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas segmen pasar.
   5) perluasan akses pemasaran melalui optimalisasi platform digital, marketplace, serta fasilitasi promosi dan pameran produk, baik di tingkat lokal maupun regional.
   6) penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha perlu ditingkatkan melalui pembentukan atau penguatan kelompok usaha, koperasi, serta kerja sama dengan sektor swasta dan distributor guna memperluas jaringan pemasaran dan akses permodalan.

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan 2025.

Dalam rangka mendukung meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan peningkatan omzet UKM pengolahan hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan pemberian sarana dan prasarana pengolahan, pelatihan pengolahan produk berbasis frozen food, serta fasilitasi labelisasi produk. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mutu produk, dan daya saing UKM pengolahan hasil perikanan.

1) Pemberian sarana dan prasarana pengolahan, seperti peralatan produksi dan pendukung pengemasan, mendorong peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi UKM.

Pemberian bantuan berupa Cooler Box 33 dan 220 liter, *Freezer, Vaccum Sealer*, Dandang Angseng, *Food Processor* kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan untuk mendukung produksi pengolahan pada Tingkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang diharapkan para Unit Pengolahan Ikan (UPI) dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Adapun rincian bantuan sebagai berikut :

Tabel 3.18 Bantuan sarana pengolahan kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan

NO.	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA ANGGOTA	JENIS SARP.RAS
1	RATU DEWI MAKMUR	JL. JATIKUSUMAN V NO. 43 DS. MRANGGEN KEC. MRANGGEN DEMAK	IIN NUR AINI	FREEZER
			ERNA ARIWIYANTI	VACCUM SEALER
			SRI WAHYUNI	DANDANG ANGSENG
			NUR FAIZAH	DANDANG ANGSENG
			FITA NURHAINI	FOOD PROCESSOR
2	SARI MANUNGGAL BANJARSARI	DK. BUKOSARI RT 001 RW 005 DS. BANJARSARI KEC. SAYUNG	ROMANAH	VACCUM PACKAGING
			RUSMINAH	FREEZER
			ABDULLAH ZAENI	VACCUM SEALER
			SUBAKIR	COOLER BOX 33 LITER
			SURURI	COOLER BOX 33 LITER
			KASAN	COOLER BOX 33 LITER
			MUNAFIATUN	COOLER BOX 33 LITER
			MUDHOFIROH	COOLER BOX 33 LITER
3	PERKUMPULAN	DESA PURWOREJO RT	H. RUMTIYANI	COOL BOX 220 L
			NUR MAKSUFAH	COOL BOX 220 L

	KELOMPOK UNTHOK OMBAK LAUT DESA PURWOREJO BONANG DEMAK	001 RW 004 KECAMATAN BONANG	SILMONAH	COOL BOX 220 L
			SITI JUWARIYAH	COOL BOX 220 L
			HAFIDHOH	COOL BOX 220 L
			SITI NURKHAYATI	COOL BOX 220 L
			RIKHALATI	COOL BOX 220 L
			MAIDAH	COOL BOX 220 L
			JUBAIDAH	COOL BOX 220 L
			SITI MUKAROMAH	COOL BOX 220 L
			USWATUN CHASANAH	COOL BOX 220 L
4	PERKUMPULAN KELOMPOK META	Ds. Tambakbulusan kec. Karangtengah	SUWARTI	FREEZER
			IMANIYAR R.R	VACCUM SEALER
			SAYADAH	COOLER BOX 33 LITER
			SUJIYATI	COOLER BOX 33 LITER
			DWI L.	COOLER BOX 33 LITER
			SUDARNI	COOLER BOX 33 LITER
			ISROAH	COOLER BOX 33 LITER
5	JAYA BAROKAH	DESA KEDUNGKARANG KECAMATAN WEDUNG	NURYATI	COOLER BOX 33 L
			MASLIKAH	COOL BOX 220 L
			NGATMINA	COOL BOX 220 L
			RIA INRIYANI	COOLER BOX 33 L
			TARWIYAH	FREEZER
			SHOLIHATUN	VACUM SEALER
			JUMIATI	FOOD PROCESSOR
6	MIFTAHUL QULUB	DESA BUKO RT.03, RW.07. WEDUNG	LAILI IDLOMAH	FREEZER
			NGATROTUN	FREEZER
			KHUMAIROH	FREEZER
7	BERKAH HASIL LAUT	DESA BUNGO RT. 02, RW.03 WEDUNG	MUNAWIR	COOL BOX 220 L
			ZAENURI	COOL BOX 220 L
			ABDUL KHOLIS	COOL BOX 220 L
			AHMAD ROHMAN	COOL BOX 220 L
			DARMOKO	COOL BOX 220 L
			EKO SULIS YANTO	COOL BOX 220 L
			YUNITA	COOL BOX 220 L
			SUHAMI	COOL BOX 220 L
			JOKO SUPRIYANTO	COOL BOX 220 L
			MASIYATI	COOL BOX 220 L
8	MEKAR LAUT ABADI	DESA PURWOREJO, RT 001 RW 007, KECAMATAN BONANG	SITI NUR HALIMAH	COOLER BOX 33 L DAN VACUM SEALER
			MUSAYIROH	COOLER BOX 33 L
			ROHMATUL FITRIYA	COOLER BOX 33 L
			ISTIROKAH	FREEZER DAN COOL BOX 22O L
			SITI MUADHOMAH	COOLER BOX 33 L
			MUZDALIFAH	COOLER BOX 33 L
			NOR ROHMAH	COOLER BOX 33 L
			SITI MUAYADAH	COOLER BOX 33 L

			NUR AZIZAH	COOLER BOX 33 L
			MUFARICHAH	COOL BOX 220 L

2) Pelatihan olahan frozen food meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang memiliki daya simpan lebih lama, kualitas yang lebih terjaga, serta nilai tambah yang lebih tinggi.
3) Selain itu, fasilitasi labelisasi produk memberikan kepastian informasi kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memperluas akses pemasaran produk olahan perikanan.

Gambar 3.16 Pelatihan Olahan Frozen Food Produk Perikanan dan memberikan bantuan sarana pengolahan kepada pelaku usaha pengolahan produksi perikanan

Dalam rangka mendukung pencapaian target peningkatan omzet UKM pengolahan hasil perikanan sebesar 8,9% pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.172.020.000 dengan realisasi mencapai Rp. 1.146.725.313 atau sebesar 97,84%. Capaian ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat tinggi serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan secara terarah melalui rangkaian kegiatan yang saling terintegrasi guna mendorong peningkatan omzet UKM. Pada aspek produksi, intervensi difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pengolahan, termasuk bantuan peralatan yang mendukung efisiensi dan kapasitas produksi. Pada aspek penguatan usaha, dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UKM yang mencakup peningkatan keterampilan teknis pengolahan, manajemen usaha, serta pengemasan produk agar lebih bernilai jual. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, program diarahkan pada fasilitasi promosi, perluasan akses pasar melalui pameran maupun kemitraan usaha, serta dukungan legalitas produk seperti perizinan

dan sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok usaha turut menjadi bagian penting dalam menciptakan usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing. Melalui pelaksanaan kegiatan yang komprehensif tersebut, program ini mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan jangkauan pemasaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan omzet UKM pengolahan hasil perikanan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas Sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**
1	Sasaran 3: Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan	%	8,8	8,9	101,14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.172.020.000	1.146.725.313	**97,84**
	Capaian					**101,14**	**Jumlah**	**1.172.020.000**	**1.146.725.313**	**97,84**
TINGKAT EFISIENSI: 3,3										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 103,37%										

Analisis Efisiensi Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan

a. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pada Sasaran "Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan" di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berjalan efisien dan optimal. Pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.172.020.000 dengan realisasi Rp. 1.146.725.313 atau 97,84% dari pagu. Meskipun tidak terserap penuh, capaian kinerja indikator peningkatan omset UKM mencapai 101,14%, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 3,3%.
b. Fokus alokasi anggaran diarahkan secara tepat pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan omset UKM, seperti pembinaan usaha, peningkatan kualitas dan kemasan produk, serta fasilitasi pemasaran. Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu

menghasilkan capaian kinerja di atas target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

c. Tingkat serapan anggaran yang tinggi disertai capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan tepat sasaran, dengan pengendalian kegiatan yang baik dan minim pemborosan. Hal ini mencerminkan bahwa program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah dan pendapatan UKM pengolahan hasil perikanan.

Analisis Efektivitas Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan

a. Capaian Kinerja Optimal; Persentase capaian kinerja indikator peningkatan omset UKM pengolahan hasil perikanan Tahun 2025 mencapai 101,14%, yang menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan target telah cukup realistis dan program yang dilaksanakan mampu memberikan hasil nyata sesuai dengan perencanaan kinerja.
b. Efektivitas Program; Efektivitas kinerja didukung oleh pelaksanaan program yang tepat sasaran, khususnya pada kegiatan pembinaan UKM, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, serta fasilitasi pemasaran. Dampak dari intervensi tersebut terlihat dari meningkatnya omset UKM, yang mencerminkan adanya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil perikanan.
c. Dampak Ekonomi Nyata; Efektivitas program juga tercermin dari kontribusinya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi sektor pengolahan hasil perikanan. Peningkatan omset UKM menunjukkan adanya pertumbuhan usaha, perluasan akses pasar, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha. Hal ini menjadi indikasi bahwa program tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

7. Analisis kinerja **Sasaran 4**: **"Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan"**

   Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mencapai 100,17% dan termasuk predikat "Sangat Tinggi" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	Capaian %		
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	49.761	57.301	57.901	59.950	61.035	61.139,80	100,17	61.625	99,21

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan pada tahun 2025 sebesar 61.139,80. Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2024 sebesar 59.950. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 57.901.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan didapatkan dari perhitungan:

Jumlah produksi perikanan budidaya + Jumlah produksi perikanan tangkap

Sektor ini memiliki kontribusi signifikan, secara historis menopang sekitar 20% PDRB Demak. Target Produksi untuk tahun 2025, target total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) ditetapkan sebesar 61.035 Ton. Rincian target spesifik mencakup produksi perikanan tangkap sebesar 9.139 Ton dan perikanan budidaya sebesar 51.896 Ton.

Berdasarkan data untuk perikanan laut, jumlah tangkapan ikan tahun 2025 sebesar 9.143,95 Ton. Dengan hasil produksi pada perairan umum sebesar 1.009,28 Ton dan produksi perairan laut sebesar 8.134,67 Ton, total nilai produksi Rp. 297.883.729.444,- dengan jumlah Nelayan 10.546 orang. Data perikanan budidaya, jumlah produksi ikan air tawar tahun 2025 sebesar 51.995,85 Ton, jumlah pembudidayaan air tawar 1.201 orang dan produksi ikan air payau sebesar 10.302,83 Ton jumlah pembudidaya air payau 3.130

orang total nilai produksi Rp. 1.118.929.594.000,-. Berikut ini jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021-2025:

Tabel 3.21 Produksi Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	*Jenis Usaha*	*Produksi (Ton)*				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Budidaya air Tawar	20.065,70	18.976,06	41.992,76	41.758,98	41.693,02
2	Budidaya air Payau	4.231,44	3.819,07	8.288,59	9.083,136	10.302,83
4	Perairan Umum	661,921	742,691	744,919	917,493	1.009,28
5	Perairan Laut	6.775,68	7.224,69	6.874,91	8.190,16	8.134,67
	Total	**31.734,74**	**30.762,51**	**57.901,18**	**59.949,77**	**61.139,80**

Sumber : Analisis DINLUTKAN Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Produksi Perikanan dalam 5 tahun mengalami penurunan jumlah produksi 972,23 Ton pada tahun 2022 berada di titik tertinggi pada tahun 2023 dengan kenaikan jumlah produksi 27.138,67 Ton, namun mengalami penurunan jumlah produksi 972,23 Ton pada tahun 2024. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan kenaikan jumlah produksi sebesar 1.190,03 Ton.

Analisis perbandingan kinerja produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2022–2025, pada Kabupaten Demak, Jepara, dan Pati, secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif dengan karakteristik perkembangan yang berbeda pada masing-masing daerah. Produksi perikanan Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil setiap tahun. Pada tahun 2022 57.301 Ton, 2023 57.901 Ton (naik 600 Ton atau 1,05%), 2024 59.950 Ton (naik 2.049 Ton atau 3,54%), 2025 61.139,80 Ton (naik 1.189,80 Ton atau 1,98%). Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 terjadi peningkatan sebesar 3.838,80 Ton atau 6,70%. Pola ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dan terkendali, dengan kecenderungan peningkatan kapasitas produksi secara bertahap.

Produksi perikanan Kabupaten Jepara mengalami peningkatan konsisten dari Tahun 2022 hingga 2024, yaitu tahun 2022 42.296,47 Ton, 2023 43.858,09 Ton (naik 1.561,62 Ton atau 3,69%), 2024 44.556,44 Ton (naik 698,35 Ton atau 1,59%). Pada Tahun 2025 terjadi lonjakan signifikan menjadi 60.266,83 Ton, meningkat sebesar 15.710,39 Ton atau 35,26% dibandingkan Tahun 2024. Kenaikan tajam ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja sektor perikanan, baik dari sisi intensifikasi budidaya maupun peningkatan

produktivitas perikanan tangkap. Secara kumulatif 2022–2025, produksi Jepara meningkat 42,49%.

Produksi perikanan Kabupaten Pati memiliki volume produksi terbesar dibandingkan dua kabupaten lainnya. Perkembangannya menunjukkan tahun 2022 116.949,70 Ton, 2023 123.588,16 Ton (naik 6.638,46 Ton atau 5,67%), 2024 134.640,83 Ton (naik 11.052,67 Ton atau 8,94%). Namun pada Tahun 2025 produksi mengalami penurunan menjadi 112.803,15 Ton (turun 21.837,68 Ton atau -16,22%). Meskipun demikian, secara kumulatif dibandingkan Tahun 2022, produksi Tahun 2025 masih lebih rendah sebesar 4.146,55 Ton (-3,55%). Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca, dinamika hasil tangkap, maupun tantangan pada subsektor budidaya.

Dari sisi tren kenaikan, Kabupaten Demak menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten setiap tahun, dengan kenaikan masing-masing 1,05% (2023), 3,54% (2024), dan 1,98% (2025). Selama periode 2022–2025, produksi Demak meningkat sebesar 6,70% tanpa mengalami kontraksi. Sebaliknya, Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan moderat pada 2023 dan 2024, namun melonjak tajam pada 2025 sebesar 35,26%, sehingga secara kumulatif mencatat pertumbuhan tertinggi (42,49%). Hal ini menunjukkan akselerasi kinerja yang signifikan pada akhir periode. Kabupaten Pati menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi pada 2023 dan 2024, namun mengalami penurunan signifikan pada 2025 sebesar -16,22%. Kondisi ini mengindikasikan adanya fluktuasi produksi yang cukup tajam.

Selama periode evaluasi, Kabupaten Pati merupakan daerah dengan volume produksi terbesar, diikuti Kabupaten Demak, dan kemudian Kabupaten Jepara. Pada Tahun 2022, produksi Kabupaten Demak sebesar 57.301 Ton, lebih tinggi dibandingkan Jepara (42.296,47 Ton), namun masih di bawah Pati (116.949,70 Ton). Pola ini relatif konsisten hingga Tahun 2024.

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan dinamika di mana Kabupaten Jepara mengalami lonjakan produksi signifikan hingga mencapai 60.266,83 Ton dan hampir menyamai Kabupaten Demak (61.139,80 Ton). Sementara itu, Kabupaten Pati justru mengalami penurunan produksi menjadi 112.803,15 Ton.

Sejalan dengan tren peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya Tahun 2022–2025, capaian kinerja tersebut turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan. Produktivitas yang terjaga secara konsisten tidak hanya berdampak pada aspek kuantitas hasil produksi, tetapi juga pada

optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas pelayanan dan pemanfaatan sarana prasarana perikanan.

Kontribusi PAD sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Demak didukung oleh penerimaan retribusi dari Balai Benih Ikan (BBI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wedung, serta TPI Morodemak. Pada periode pelaporan, realisasi PAD dari Balai Benih Ikan (BBI) tercatat sebesar Rp.19.680.000,-, sedangkan kontribusi dari TPI Wedung dan TPI Morodemak mencapai Rp.720.000.000,-. Besaran penerimaan ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan distribusi hasil perikanan memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah, khususnya melalui mekanisme retribusi pelayanan usaha perikanan.

Stabilitas dan peningkatan produksi perikanan tidak hanya mencerminkan capaian indikator kinerja sektor teknis, tetapi juga berimplikasi positif terhadap kinerja fiskal daerah. Optimalisasi pengelolaan BBI dan TPI sebagai simpul produksi dan pemasaran menjadi faktor strategis dalam mendukung keberlanjutan penerimaan PAD sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Demak.

Untuk menjaga kesinambungan kontribusi PAD dari sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan penguatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi berbasis pesisir. Infrastruktur pelabuhan seperti di Morodemak terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas nelayan, meskipun terkendala status wilayah kerja operasional. Pengembangan "*Blue Economy*": Melalui program *Blue-Coast* (kerja sama dengan IFAD), Demak mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan di desa pesisir seperti Purworejo (Bonang), Tambakbulusan (Karangtengah), dan Timbulsloko (Sayung). Program ini fokus pada ketahanan pesisir, pembangunan sarana prasarana, dan penguatan kelembagaan. Implementasi Program *Blue-Coast*: Mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga internasional (seperti IFAD) melalui program *Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods*. Fokus pada desa pesisir strategis (Purworejo, Tambakbulusan, Timbulsloko) untuk membangun ketahanan pesisir sekaligus menciptakan mata pencaharian alternatif yang tahan iklim.

Revitalisasi Mangrove (*Silvofishery*): Mengintegrasikan budidaya perikanan dengan konservasi mangrove. Ini tidak hanya mencegah abrasi tetapi juga menyediakan habitat bagi komoditas bernilai tinggi seperti kepiting atau udang, mendukung target produksi perikanan budidaya.

Matriks Peran Kolaborasi Lintas Sektor Program *Blue-Coast* :

Tabel 3.22 Matriks Peran Kolaborasi Lintas Sektor Program *Blue-Coast*

Kolaborator	Peran dalam Program *Blue-Coast*	*Output* terhadap Kinerja (IKU Dinlutkan)
IFAD (International Fund for Agricultural Development)	Memberikan dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan pembangunan sarana prasarana ekonomi biru (tambak ramah lingkungan, perlindungan pesisir, fasilitas produksi)	Peningkatan **produksi perikanan budidaya air payau ±5%**, berkontribusi langsung pada IKU Produksi Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Penyelarasan kebijakan nasional, pendampingan teknis, serta fasilitasi standar budidaya berkelanjutan	Meningkatkan **kualitas dan keberlanjutan produksi perikanan**, mendukung IKU Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap
Pemerintah Kabupaten Demak (Bapperida & Perangkat Daerah terkait)	Koordinasi lintas sektor, integrasi program *Blue-Coast* ke RP.JMD dan RKPD, serta dukungan regulasi daerah	Meningkatkan **efektivitas program lintas OPD** dan pencapaian **sasaran strategis Dinlutkan**
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	Pelaksana teknis program, pembinaan kelompok, monitoring dan evaluasi kinerja	Peningkatan **capaian IKU utama Dinlutkan**, khususnya produksi budidaya, ketahanan pesisir, dan pengolahan hasil perikanan
Pemerintah Desa (Purworejo, Tambakbulusan, Timbulsloko)	Penyediaan lokasi, penguatan kelembagaan desa, serta mobilisasi partisipasi masyarakat	Peningkatan **akses layanan perikanan** dan **responsivitas pelayanan publik**
Kelompok Pembudidaya dan Nelayan	Pelaksana langsung kegiatan budidaya, rehabilitasi tambak, dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Peningkatan **produktivitas dan pendapatan pelaku usaha perikanan**, mendukung IKU produksi
Lembaga Pendamping/NGO	Pendampingan sosial, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan kelompok	Meningkatkan **keberlanjutan usaha perikanan** dan stabilitas produksi
Perguruan Tinggi/Akademisi	Kajian teknis, inovasi teknologi, dan rekomendasi kebijakan berbasis data	Mendukung **peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja berbasis eviden**

Kolaborasi lintas sektor dalam Program *Blue-Coast* menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra internasional, dan masyarakat. Peran IFAD sebagai mitra strategis memberikan kontribusi signifikan melalui dukungan pendanaan dan bantuan teknis yang berdampak langsung pada peningkatan produksi perikanan budidaya air payau. Sementara itu, keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan keselarasan kebijakan dan penerapan prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai pelaksana teknis menjadi kunci dalam memastikan *output* program berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, penguatan ketahanan pesisir, dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Kolaborasi ini memperkuat capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak serta mendukung peningkatan nilai SAKIP melalui pengelolaan kinerja yang kolaboratif dan terukur.

a. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan 2025

1) **Peningkatan sarana usaha perikanan tangkap**
   Ketersediaan alat tangkap dan sarana pendukung yang memadai mendorong peningkatan efektivitas dan hasil tangkapan nelayan;
2) **Peningkatan prasarana nelayan**
   Pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti pemasangan lampu suar serta penambahan tempat sandar kapal memberikan kemudahan operasional dan meningkatkan keselamatan nelayan;
3) **Peningkatan pemberdayaan nelayan**
   Pelatihan perbengkelan dan keterampilan teknis lainnya meningkatkan kemampuan nelayan dalam perawatan alat dan mesin, sehingga operasional menjadi lebih efisien;
4) **Tercukupi kebutuhan BBM nelayan**
   Ketersediaan bahan bakar yang memadai mendukung kelancaran aktivitas melaut tanpa hambatan, sehingga produktivitas tangkap tetap terjaga;
5) **Peningkatan produktivitas usaha perikanan budidaya masyarakat**
   Pengelolaan budidaya yang lebih baik mendorong peningkatan hasil panen secara konsisten.
6) **Ketersediaan benih dan pakan yang relatif terjaga**
   Dukungan input produksi yang stabil memastikan kelangsungan siklus budidaya tanpa hambatan.
7) **Adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan**
   Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan berdampak pada efisiensi produksi dan keberhasilan panen.

b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/ tantangan dalam pencapaian kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan 2025

1) **Faktor cuaca (musim angin barat)**

   Kondisi gelombang tinggi pada musim angin barat menyebabkan berkurangnya frekuensi melaut nelayan, sehingga berdampak pada penurunan produksi perikanan tangkap;

2) **Pendangkalan alur pelabuhan/ TPI**

   Terjadinya pendangkalan di area pelabuhan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menghambat aktivitas keluar-masuk kapal, serta memperlambat proses sandar dan bongkar muat hasil tangkapan;

3) **Pendaratan hasil tangkapan di luar wilayah**

   Sebagian nelayan masih mendaratkan hasil tangkapan di luar wilayah Kabupaten Demak, sehingga data produksi tidak tercatat secara optimal dan mempengaruhi akurasi capaian kinerja;

4) **Keterbatasan sarana prasarana dan sistem pencatatan**

   Sarana pendukung produksi dan pencatatan hasil perikanan masih belum optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan data dan pengukuran kinerja;

5) **Dampak banjir rob di wilayah pesisir**

   Banjir rob menyebabkan terendamnya lahan tambak budidaya sehingga mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana tambak serta terganggunya aktivitas produksi;

6) **Penurunan produktivitas dan peningkatan biaya produksi**

   Kondisi rob mengakibatkan penurunan hasil produksi serta meningkatnya biaya pemeliharaan tambak, seperti perbaikan sarana, penggantian air, dan pengendalian kualitas lingkungan.

c. Rekomendasi perbaikan capaian kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan 2025

1) **Faktor cuaca (musim angin barat)**

   penguatan sistem informasi cuaca dan peringatan dini kepada nelayan serta penyesuaian waktu melaut agar lebih aman dan produktif

2) **Pendangkalan alur pelabuhan/TPI**

   usulan normalisasi dan pengerukan alur pelayaran serta peningkatan sarana prasarana pelabuhan, sehingga aktivitas keluar-masuk kapal dan bongkar muat dapat berjalan lancar. Penanganan ini juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait

3) **Pendaratan hasil tangkapan di luar wilayah**

penguatan kebijakan dan pembinaan kepada nelayan agar melakukan pendaratan di wilayah Kabupaten Demak, disertai peningkatan fasilitas dan pelayanan di TPI agar lebih menarik dan kompetitif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data produksi serta optimalisasi penerimaan daerah

4) **Keterbatasan sarana prasarana dan sistem pencatatan**

peningkatan fasilitas pendukung produksi dan modernisasi sistem pencatatan berbasis digital. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas petugas pencatat data serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar data produksi perikanan lebih akurat, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan

5) **Penanganan dampak banjir rob di wilayah pesisir**

Rehabilitasi dan peningkatan tanggul tambak, pembangunan serta normalisasi saluran drainase dan pintu air, serta penataan kawasan tambak berbasis mitigasi rob melalui koordinasi lintas sektor;

6) **Peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya usaha**

Penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, pemberian bantuan sarana produksi yang tepat sasaran, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pembudidaya

d. Program/ Kegiatan yang mendukung kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan 2025.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain pelatihan bagi pelaku usaha perikanan, pemberian bibit dan pakan kepada kelompok pembudidaya ikan, serta penyediaan alat tangkap bagi nelayan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas usaha, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perikanan dalam penerapan teknologi budidaya, pengelolaan usaha, serta praktik penangkapan ikan yang efektif dan ramah lingkungan. Pemberian bibit dan pakan kepada kelompok pembudidaya ikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kelangsungan hidup ikan, percepatan siklus produksi, serta peningkatan hasil panen.

Dengan dukungan sarana produksi yang memadai, kelompok pembudidaya mampu meningkatkan volume dan kualitas produksi perikanan budidaya.

Gambar 3.17 Pelatihan, pemberian bibit dan pakan pada kelompok pembudidaya ikan, dan penyediaan alat tangkap usaha perikanan

Sementara itu, penyediaan alat tangkap usaha perikanan mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan. Ketersediaan alat tangkap yang sesuai standar memungkinkan nelayan meningkatkan hasil tangkapan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya kelautan. Sinergi antara pelatihan, dukungan sarana produksi budidaya, dan penyediaan alat tangkap tersebut berdampak positif terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan kelautan di Kabupaten Demak, sekaligus mendukung pencapaian sasaran kinerja dan penguatan ekonomi masyarakat perikanan.

Gambar 3.18 Pemberian alat tangkap usaha perikanan

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melalui Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan mengembangkan sistem aplikasi bernama ADIPTA (Aplikasi Data dan Informasi Perikanan Tangkap). Aplikasi ini merupakan inovasi pelayanan digital yang mendukung pelaksanaan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengatur penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)

dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.

Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nelayan dalam mengajukan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Nelayan dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi di rumah, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Serta menekan penyalahgunaan, seperti misalnya upaya manipulasi data agar bisa membeli BBM bersubsidi meski sudah tidak memiliki kapal, karena akan mudah dideteksi.

Proses permohonan rekomendasi secara daring tersebut akan diproses maksimal lima hari sejak tanggal pengajuan. Persyaratan permohonan surat rekomendasi pembelian BBM yang harus disiapkan antara lain PAS (Surat Tanda Kebangsaan Kapal), swapfoto pemilik kapal, KTP, nomor induk berusaha (NIB), Surat Persetujan Berlayar (SPB), serta foto kapal dengan dilengkapi GPS (*Global Positioning System*) atau lokasi dan koordinat. Saat ini ADIPTA telah terintegrasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Aplikasi XStar yang merupakan salah satu alat kontrol penggunaan BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran. Saat ini aplikasi tersebut dapat diakses melaului alamat website : https://adipta.demakkab.go.id/

Gambar 3.19 Dashboard Aplikasi ADIPTa

Rekomendasi BBM menjadi dasar bagi nelayan untuk memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi (Solar), yang merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan melaut. Dengan adanya rekomendasi tersebut, distribusi BBM dapat dikendalikan agar tepat sasaran, yaitu hanya diberikan kepada nelayan aktif yang memenuhi persyaratan.

Dari sisi kinerja, ketersediaan BBM yang cukup dan tepat waktu secara langsung mempengaruhi frekuensi melaut, jangkauan daerah penangkapan, serta volume hasil tangkapan. Nelayan yang memperoleh BBM secara lancar cenderung dapat melaut lebih sering dan lebih jauh, sehingga berdampak pada peningkatan produksi perikanan tangkap. Sebaliknya, keterbatasan akses BBM akan menurunkan aktivitas melaut dan beRp.otensi menurunkan capaian produksi.

Selain itu, sistem rekomendasi BBM juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pendataan, karena memuat informasi terkait identitas nelayan, kapal, dan kebutuhan BBM. Data ini penting untuk perencanaan program, pengambilan kebijakan, serta evaluasi kinerja sektor perikanan tangkap. Dengan adanya sistem yang lebih tertib dan berbasis data, pengelolaan sektor perikanan menjadi lebih akuntabel dan terarah.

Dengan demikian, rekomendasi BBM tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai pendorong utama produktivitas nelayan, pengendali distribusi energi subsidi, serta pendukung peningkatan kinerja produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, dan kelautan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.509.352.530 dengan realisasi mencapai Rp. 3.450.818.190 atau sebesar 98,33%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat tinggi serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan secara menyeluruh.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dilaksanakan dengan tingkat capaian sebesar 97,86% dan difokuskan pada penguatan aktivitas penangkapan ikan melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, peningkatan kapasitas armada nelayan, serta dukungan operasional kegiatan melaut. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan volume hasil tangkapan, efisiensi kegiatan penangkapan, serta optimalisasi pendaratan ikan di wilayah daerah.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilaksanakan dengan capaian sebesar 98,72% dan diarahkan pada peningkatan produktivitas usaha budidaya melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kualitas benih dan pakan, serta pendampingan teknis kepada pembudidaya. Program

ini juga mendorong penerapan teknik budidaya yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya.

Sinergi pelaksanaan kedua program tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan total produksi perikanan, baik dari sektor tangkap maupun budidaya. Dengan dukungan anggaran yang optimal dan pelaksanaan program yang efektif, capaian kinerja produksi perikanan menunjukkan hasil yang sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan produksi akan terus diarahkan pada penguatan efisiensi, keberlanjutan sumber daya, serta peningkatan kualitas hasil perikanan guna mendukung pertumbuhan sektor perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program /	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 4: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	61.035	61.139,80	100,17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.584.082.530	1.550.186.852	97,86
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.925.270.000	1.900.631.338	98,72
	Capaian					**100,17**	**Jumlah**	**3.509.352.530**	**3.450.818.190**	**98,33**
TINGKAT EFISIENSI: 1,84										
TINGKAT EFEKTIVITAS: 101,87%										

Analisis Efisiensi

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan

a. Pengelolaan anggaran dan kinerja program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak menunjukkan kondisi yang efisien dan optimal. Hal ini tercermin dari capaian indikator produksi perikanan sebesar 61.139,80 ton dari target 61.035 ton atau mencapai 100,17%, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa

target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat.

b. Fokus alokasi anggaran pada kegiatan produktif diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan produksi, seperti penyediaan sarana dan prasarana perikanan, dukungan operasional nelayan, serta peningkatan produktivitas budidaya. Strategi ini terbukti efektif karena mampu menghasilkan output kinerja yang maksimal dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.
c. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi tercermin dari capaian efektivitas sebesar 101,87%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga sangat efektif dalam mencapai target kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Analisis Efektivitas Kinerja Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

a. Capaian Kinerja Sangat Tinggi; Persentase capaian kinerja produksi perikanan Tahun 2025 mencapai 101,87%, dengan realisasi sebesar 61.139,80 ton dari target yang ditetapkan sebesar 61.035 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui, yang mengindikasikan perencanaan target yang cukup realistis serta didukung oleh pelaksanaan program yang optimal di lapangan. Kinerja ini juga mencerminkan adanya peningkatan produktivitas baik pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya secara agregat.
b. Efisiensi Penggunaan Anggaran; Tingkat efisiensi tercatat sebesar 1,84 yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan anggaran yang relatif terkendali mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari sisi perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, maupun optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
c. Efektivitas Program Pendukung; Tingginya capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari kontribusi program-program utama, khususnya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang secara langsung mendorong peningkatan volume produksi. Intervensi berupa penyediaan sarana produksi, dukungan operasional, serta pendampingan teknis kepada pelaku usaha terbukti mampu meningkatkan produktivitas. Sinergi antara kedua program

tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan total produksi perikanan, sehingga capaian kinerja tidak hanya efektif secara kuantitatif tetapi juga menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas secara menyeluruh. Analisis tersebut tidak hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara pencapaian sasaran dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukungnya. Untuk memperjelas hubungan tersebut secara lebih sistematis dan terukur, selanjutnya disajikan rekapitulasi capaian kinerja yang menghubungkan tujuan, sasaran, serta program, kegiatan, dan subkegiatan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya capaian sasaran strategi perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target	100%	83,33%	83,33%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (persen)		persen	100	100	100	4.422.095.767	3.731.152.839	84,38
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi program renja perangkat Daerah dengan program renstra perangkat daerah dengan program RP.JMD (laporan)	Jumlah dokumen yang disusun sesuai tahapan dan waktu	laporan	8	8	100	20.893.000	18.831.500	90,13
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan=∑(dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan)	dokumen	2	2	100	4.822.000	4.756.250	98,64
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen=(Jumlah RKA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	dokumen	2	2	100	6.557.000	4.691.750	71,55

						SKPD (dokumen)								
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen=(Jumlah DPA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	dokumen	2	2	100	4.757.000	4.691.750	98,63
					Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Dokumen=(Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD)+(Jumlah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)+(Jumlah Laporan Hasil Koordinasi yang disusun)	laporan	2	2	100	4.757.000	4.691.750	98,63
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Administrasi keuangan perangkat daerah yang dicukupi (Bulan)	Tingkat Pemenuhan (bulan)=∑(bulan yang memenuhi penyusunan administrasi dan laporan keuangan sesuai ketentuan)	Bulan	12	12	100	4.401.202.767	3.712.321.339	84,35
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN=∑(ASN penerima gaji dan tunjangan pada periode tertentu)	OB	16	28	175	4.048.203.967	3.368.356.259	83,21

					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Jumlah Dokumen= ∑(dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diterbitkan selama tahun berjalan)	dokumen	12	12	100	352.998.800	343.965.080	97,44
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (persen)		persen	100	100	100	989.727.000	951.982.289	96,19
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi (laporan)	Tingkat Pemenuhan (laporan)=∑(Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan BMD yang disusun pada tahun berjalan)	laporan	2	2	100	10.000.000	9.716.543	97,17
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD= ∑(Laporan penatausahaan BMD yang disusun SKPD dalam 1 tahun anggaran)	laporan	2	2	100	10.000.000	9.716.543	97,17
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	IKM Administrasi Kepegawaian (persen)	Tingkat Pemenuhan Layanan (%)=Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang teRp.enuhi /Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diajukan ×100%	persen	100	100	100	213.610.000	209.528.001	98,09

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas=Jumlah paket pakaian dinas lengkap dengan atribut kelengkapan yang berhasil diadakan dan didistribusikan kepada ASN	paket	45	49	108,89	72.000.000	69.068.315	95,93
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat=∑Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi serta dinyatakan lulus/selesai	orang	45	49	108,89	141.610.000	140.459.686	99,19
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	administrasi Umum perangkat daerah yang teRp.enuhi (persen)	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran= Jumlah Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Perkantoran/Jumlah Pegawai×100%	persen	100	60	60	207.360.000	202.372.632	97,59
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan=∑(Total Paket yang Disediakan dalam 1 Tahun)	paket	26	26	100	9.689.500	9.311.000	96,09
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan=∑(Total Paket yang Tersedia dalam 1 Tahun)	paket	47	47	100	75.000.000	72.068.600	96,09

					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan=∑(Total Paket yang Tersedia dalam 1 Tahun)	paket	20	20	100	10.260.500	9.632.500	93,88
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD=∑(Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis yang Disusun dalam 1 Tahun)	dokumen	1	1	100	7.000.000	6.802.500	97,18
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan=∑(Total Paket Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia dalam 1 Tahun)	paket	8	8	100	10.000.000	9.295.600	92,96
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD=∑(Total Laporan yang Disusun dalam 1 Tahun)	laporan	350	301	86	95.410.000	95.262.432	99,85
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah BMD yang tersedia (unit)	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah = ∑(pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran)	unit	1	1	100	57.107.000	47.450.000	83,09
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100	57.107.000	47.450.000	83,09

						Disediakan (unit)								
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor (persen)	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) = Jumlah Jasa Penunjang yang Terealisasi/Jumlah Jasa Penunjang yang Direncanakan ×100%	persen	100	100	100	119.500.000	116.288.353	97,31
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat=∑Laporan yang Dihasilkan dan Disahkan dalam 1 Tahun	laporan	30	30	100	6.000.000	6.000.000	100,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa=∑Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Disahkan dalam 1 Tahun	laporan	4	4	100	113.500.000	110.288.353	97,17
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah BMD yang teRp.elihara (unit)	Persentase BMD dalam Kondisi Baik = Jumlah BMD dalam Kondisi Baik/Total Jumlah BMD ×100%	unit	55	55	100	382.150.000	366.626.760	95,94

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya=∑(Unit Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya)	unit	2	3	150	91.500.000	90.819.890	99,26
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya=∑(Unit Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya)	unit	17	17	100	73.150.000	62.616.200	85,60
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Gedung/Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi= ∑(Unit Gedung/Bangunan yang Telah Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)	unit	1	1	100	200.000.000	198.070.670	99,04
					Pemelihraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Sarana/Prasarana yang Dipelihara/Direhabilitasi=∑(Unit Sarana/Prasarana yang Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)	unit	15	15	100	7.500.000	6.425.000	85,67
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung yang Dipelihara/Direhabilitasi=∑(Unit Sarana/Prasarana Pendukung yang Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)	unit	20	19	95	10.000.000	8.695.000	86,95

Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	61035 Ton	61139,8 Ton	100,17 %	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di laut (pelabuhan+non pelabuhan) dan perikanan umum daratan (PUD)	Ton	9134,97	9.143,850	100,10	1.584.082.530	1.550.186.852	97,86
					PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (paket)	Jumlah Pendampingan=∑(Paket Pendampingan yang Terealisasi dan Terverifikasi)	paket	95	97	102,11	1.175.732.530	1.146.251.307	97,49
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan=∑(Dokumen Data dan Informasi yang Tersedia dan Terverifikasi)	dokumen	1	1	100	66.992.500	65.341.509	97,54
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia=∑(Unit Prasarana yang Disediakan dan Siap Digunakan)	unit	75	77	102,67	1.011.575.000	985.949.548	97,47

					Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia=∑(Unit Sarana yang Disediakan, Layak, dan Siap Digunakan)	unit	20	20	100	97.165.030	94.960.250	97,73
					PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan=∑(Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dibina)	kelompok	23	49	213,04	160.450.000	158.082.125	98,52
					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya=∑(Nelayan Kecil yang Memenuhi Kriteria Peningkatan Kapasitas)	orang	140	140	100	160.450.000	158.082.125	98,52
					PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah saRp.ras Penyelenggaraan TPI yang tersedia (TPI)	Jumlah TPI yang tersedia (unit)=∑ TPI tersedia pada tahun berjalan	TPI	2	2	100	247.900.000	245.853.420	99,17
					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	Jumlah Layanan TPI (layanan)=∑ Layanan TPI yang terlaksana pada tahun berjalan	layanan	2	2	100	247.900.000	245.853.420	99,17
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya=∑ Produksi Budidaya per Komoditas (Ton)	Ton	51.873,06	51995,85	100,24	1.925.270.000	1.900.631.338	98,72

					PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Cakupan bina kelompok pembudi daya (kelompok)	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya =∑Kelompok Pembudidaya yang Dibina	kelompok	42	48	114,29	554.305.000	540.322.725	97,48
					Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas=∑ Kelompok Pembudi Daya yang Terdaftar dan Hadir	kelompok	20	20	100	100.000.000	94.287.075	94,29
					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	Jumlah Kelompok Usaha Terlayani=∑ Kelompok Budidaya yang Mendapat Layanan	kelompok	22	22	100	454.305.000	446.035.650	98,18
					PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (paket)	Jumlah Paket SaRp.ras Tersedia=∑ Paket SaRp.ras Budidaya yang Disediakan dan Tersalurkan	paket	9	18	200	1.370.965.000	1.360.308.613	99,22
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan=∑Unit Prasarana yang Disediakan dan Siap Digunakan	unit	4	8	200	1.181.335.000	1.172.364.888	99,24

					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan= ∑Unit Sarana yang Tersedia dan Siap Digunakan	unit	5	10	200	189.630.000	187.943.725	99,11
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	8,8%	8,9%	101,7%	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru (%)	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan = ∑Volume Produksi Olahan Perikanan	%	8,8	8,9	101,14	1.172.020.000	1.146.725.313	97,84
					PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Pohlahsar yang terbina pada produk olahan perikanan (orang)	Jumlah=Speserta pembinaan yang terdaftar dan tervalidasi	orang	61	61	100	150.000.000	143.988.750	95,99
					Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala	Jumlah=SUnit Usaha Peserta Pembinaan yang tervalidasi dan tercatat	Unit usaha	61	61	100	150.000.000	143.988.750	95,99

						Usaha dan Risiko (Unit usaha)								
					PENYEDIAAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan (KG)	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan=∑ Volume kebutuhan bahan baku ikan da ri unit usaha pengolah an ikan	KG	1125	2811	249,87	1.022.020.000	1.002.736.563	98,11
					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	Jumlah ketersediaan ikan=∑Volume ikan untuk konsumsi langsung masyarakat maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan ikan	Ton	1,125	2,811	249,87	625.000.000	614.123.275	98,26
					Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usa ha Terfasilitasi=∑pe laku usaha yang terfasilitasi sesuai kriteria	Pelaku usaha	100	100	100	397.020.000	388.613.288	97,88

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 2025

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 telah melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan. Adapun total anggaran sebesar Rp. 10.093.195.297 (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), terealisasi sebesar 9.280.678.631 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan capaian 91,94%.

Realisasi anggaran belanja apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**783.200.000,00**	**789.080.000,00**	**100,75**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**783.200.000,00**	**789.080.000,00**	**100,75**
4.1.02	Retribusi Daerah	783.200.000,00	789.080.000,00	100,75
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	783.200.000,00	789.080.000,00	100,75
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunanp	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.000.000,00	49.400.000,00	112,27
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.000.000,00	49.400.000,00	112,27
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	19.200.000,00	19.680.000,00	102,50
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	19.200.000,00	19.680.000,00	102,50
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**783.200.000,00**	**789.080.000,00**	**100,75**
	JUMLAH PENDAPATAN	**783.200.000,00**	**789.080.000,00**	**100,75**
5	**BELANJA DAERAH**	**10.093.195.297,00**	**9.280.678.631,00**	**91,95**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.031.171.297,00**	**9.228.278.631,00**	**92,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.048.203.967,00	3.368.356.259,00	83,21
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.325.803.967,00	1.856.878.656,00	79,84
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.434.210.000,00	1.268.587.491,00	88,45
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	964.210.000,00	828.692.580,00	85,95
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	470.000.000,00	439.894.911,00	93,59
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	160.000.000,00	121.177.425,00	75,74

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.000.000,00	79.853.715,00	72,59
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.000.000,00	41.323.710,00	82,65
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.000.000,00	76.770.000,00	59,05
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.000.000,00	76.770.000,00	59,05
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.000.000,00	43.315.000,00	78,75
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.000.000,00	43.315.000,00	86,63
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.000.000,00	39.015.829,00	70,94
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.000.000,00	13.135.000,00	65,68
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	35.000.000,00	25.880.829,00	73,95
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	100.000.000,00	68.925.735,00	68,93
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.000.000,00	39.831.000,00	66,39
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40.000.000,00	29.094.735,00	72,74
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	240.533.967,00	130.843.859,00	54,40
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	219.533.967,00	124.127.582,00	56,54
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	21.000.000,00	6.716.277,00	31,98
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.000,00	20.170,00	33,62
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000,00	11.261,00	37,54
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30.000,00	8.909,00	29,70
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.000.000,00	97.536.893,00	82,66
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.000.000,00	66.286.177,00	82,86
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	38.000.000,00	31.250.716,00	82,24
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.500.000,00	2.671.575,00	48,57
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.500.000,00	1.710.329,00	48,87
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.000.000,00	961.246,00	48,06
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.500.000,00	8.014.679,00	64,12
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.000.000,00	5.131.069,00	64,14
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.500.000,00	2.883.610,00	64,08
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.722.400.000,00	1.511.477.603,00	87,75
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	698.390.000,00	604.591.043,00	86,57
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	501.695.000,00	464.360.000,00	92,56
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	196.695.000,00	140.231.043,00	71,29
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.024.010.000,00	906.886.560,00	88,56
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	741.315.000,00	696.540.000,00	93,96
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	282.695.000,00	210.346.560,00	74,41
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.982.967.330,00	5.859.922.372,00	97,94
5.1.02.01	Belanja Barang	4.237.265.606,00	4.156.406.119,00	98,09
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.237.265.606,00	4.156.406.119,00	98,09
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.636.000,00	41.565.000,00	97,49
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71.400.000,00	71.400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	23.800.000,00	23.709.450,00	99,62
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	235.792.000,00	229.622.800,00	97,38
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83.725.500,00	79.948.143,00	95,49
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.365.000,00	3.317.500,00	98,59
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	80.625.106,00	75.926.411,00	94,17
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.760.000,00	5.616.000,00	97,50
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.929.500,00	9.311.000,00	93,77
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.500.000,00	2.303.000,00	92,12
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.310.500,00	51.345.000,00	96,31
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.328.150.000,00	3.273.496.198,00	98,36
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	50.830.000,00	50.549.400,00	99,45
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.619.000,00	103.135.725,00	98,58
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	62.823.000,00	60.120.177,00	95,70
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.250.000,00	45.765.315,00	94,85
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.750.000,00	18.375.000,00	98,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	875.671.050,00	840.866.777,00	96,03
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	653.310.000,00	625.869.855,00	95,80
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	70.600.000,00	64.600.000,00	91,50
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	285.200.000,00	278.847.116,00	97,77
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	102.010.000,00	101.311.686,00	99,32
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	49.000.000,00	48.005.822,00	97,97
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.500.000,00	3.052.140,00	67,83
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	60.000.000,00	59.230.391,00	98,72
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.000.000,00	13.822.700,00	55,29
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00

5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.698.800,00	21.017.964,00	88,69
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.600.000,00	18.350.124,00	93,62
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.900.000,00	1.185.744,00	62,41
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.198.800,00	1.482.096,00	67,40
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.600.000,00	45.134.500,00	98,98
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.600.000,00	45.134.500,00	98,98
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.800.000,00	20.755.000,00	95,21
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.800.000,00	20.755.000,00	95,21
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	131.262.250,00	128.089.458,00	97,58
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	96.500.000,00	95.118.050,00	98,57
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	34.762.250,00	32.971.408,00	94,85
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	485.750.644,00	481.349.490,00	99,09
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.150.000,00	83.333.390,00	97,87
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.250.000,00	68.213.390,00	99,95
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.760.000,00	8.695.000,00	89,09
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.300.000,00	98,17
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000,00	2.125.000,00	76,99
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	365.600.644,00	364.383.100,00	99,67
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	365.600.644,00	364.383.100,00	99,67
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	33.633.000,00	96,09
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	35.000.000,00	33.633.000,00	96,09
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	345.280.030,00	342.299.986,00	99,14
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	345.280.030,00	342.299.986,00	99,14
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236.005.030,00	233.099.986,00	98,77
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.275.000,00	109.200.000,00	99,93

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**10.031.171.297,00**	**9.228.278.631,00**	**92,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**62.024.000,00**	**52.400.000,00**	**84,48**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.024.000,00	52.400.000,00	84,48
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.024.000,00	47.450.000,00	83,21
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.024.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.024.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	55.000.000,00	47.450.000,00	86,27
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.000.000,00	47.450.000,00	86,27
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**62.024.000,00**	**52.400.000,00**	**84,48**
	JUMLAH BELANJA	**10.093.195.297,00**	**9.280.678.631,00**	**91,95**
	SURP.LUS/DEFISIT	**(9.309.995.297,00)**	**(8.491.598.631,00)**	**91,21**

3.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk memberikan gambaran efisiensi penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran strategis, disajikan informasi mengenai alokasi, realisasi, serta keterkaitannya dengan capaian kinerja. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran dan Tingkat efisiensi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program		Pagu	Realisasi Keuangan	(%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	989.727.000	951.982.289	96,19
		Rata-rata capaian				**100**		**Total per sasaran**	**989.727.000**	**951.982.289**	96,19
Tingkat Efisiensi: 3.81%											
Tingkat Efektivitas: 103.96%											
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target	%	100	83,33		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.422.095.767	3.731.152.839	84,38
		Rata-rata capaian				**83,33**		**Total per sasaran**	**4.422.095.767**	**3.731.152.839**	84,38
3	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	8,8	8,9	101,14	3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.172.020.000	1.146.725.313	97,84
		Rata-rata capaian				**101,14**		**Total per sasaran**	**1.172.020.000**	**1.146.725.313**	97,84
Tingkat Efisiensi: 3.30%											
Tingkat Efektivitas: 103.37%											
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Tangkap dan Kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	61.035	61.139,80	100,17	4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.584.082.530	1.550.186.852	97,86
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.925.270.000	1.900.631.338	98,72
		Rata-rata capaian				**100,17**		**Total per sasaran**	**3.509.352.530**	**3.450.818.190**	98,33
Tingkat Efisiensi: 1.84%											
Tingkat Efektivitas: 101.87%											
								TOTAL KESELURUHAN	**10.093.195.297**	**9.280.678.631**	91,95

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun berjalan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan

sebagian besar sasaran strategis mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, serta didukung oleh penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Pada Sasaran 1 yaitu terwujudnya pelayanan publik yang responsif, tingkat efektivitas mencapai 100,00% yang menunjukkan bahwa seluruh target indikator kinerja telah tercapai. Realisasi anggaran sebesar 96,19% dari pagu dengan tingkat efisiensi sebesar 3,81% mencerminkan bahwa pencapaian kinerja dapat dilakukan secara optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia.

Pada Sasaran 2 yaitu meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, tingkat efektivitas sebesar 83,33% menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target. Meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 84,38%, kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi yang terjadi belum diikuti dengan optimalnya hasil kinerja, sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif.

Pada Sasaran 3 yaitu meningkatnya produksi olahan hasil perikanan, tingkat efektivitas mencapai 101,14% yang berarti capaian kinerja melampaui target. Dengan realisasi anggaran sebesar 97,84% dan tingkat efisiensi sebesar 3,30%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berjalan secara efisien dan mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Selanjutnya pada Sasaran 4 yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap, budidaya, dan kelautan, tingkat efektivitas sebesar 100,17% menunjukkan bahwa target telah tercapai dengan sangat baik. Realisasi anggaran sebesar 98,33% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,84% mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah optimal dan seimbang dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas sasaran strategis mencapai target. Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran juga telah dikelola secara optimal, meskipun masih terdapat sasaran yang perlu ditingkatkan efektivitasnya agar sejalan dengan efisiensi anggaran yang dicapai. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program agar capaian kinerja dapat lebih merata dan optimal pada seluruh sasaran strategis.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari pengukuran pencapaian tujuan serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka pencapaian tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi 91,66 dengan capaian 100,01 dari target 91,65 dengan kriteria penilaian sangat tinggi;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi 79,41 dengan capaian 100,14 dari target 79,30 dengan kriteria penilaian sangat tinggi;
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan dengan indikator LPE Subkategori Perikanan terealisasi 0,74 dengan capaian 13,05 dari target 5,67 dengan kriteria penilaian sangat rendah.
4. Pendapatan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 789.080.000,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 783.200.000,00 atau terealisasi sebesar 100,75%.
5. Belanja Daerah tahun 2025 menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan dari total APBD Kabupaten Demak Rp. 10.093.195.297,00 terealisasi Rp. 9.280.678.631,00 atau terealisasi sebesar 91,95 %.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025, maka pengukuran pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif, dengan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti terealisasi 100 % dengan capaian 100 % dari target 100 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target terealisasi 83,33% dengan capaian 83,33% dari target 100% dengan kriteria penilaian tinggi;

3. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan, dengan indikator total produksi perikanan tangkap dan budidaya terealisasi 61.139,80 Ton dengan capaian 100,17% dari target 61.035 Ton dengan kriteria penilaian sangat tinggi.
4. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan terealisasi 8,9% dengan capaian 101,14% dari target 8,8% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Tabel 4.1. Strategi Peningkatan Kinerja DINLUTKAN

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik					
Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif					
No	**Permasalahan Utama**	**Strategi Peningkatan Kinerja**	**Program/Kegiatan Pendukung**	**Target Kinerja**	**Waktu Penyelesaian**
1	Pelayanan belum sepenuhnya cepat dan terstandar	Peningkatan standar pelayanan publik yang responsif dan terukur	Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan	SOP pelayanan diterapkan di seluruh unit layanan	2026
2	Pemanfaatan teknologi pelayanan masih terbatas	Digitalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan sektor perikanan	Pengembangan layanan perikanan berbasis elektronik	≥70% layanan dapat diakses secara digital	2026–2027
3	Kompetensi petugas layanan belum merata	Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik	Pelatihan pelayanan prima bagi petugas	Seluruh petugas layanan tersertifikasi pelayanan prima	2026
4	Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal	Penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengembangan kanal pengaduan dan tindak lanjut	≥90% pengaduan ditindaklanjuti tepat waktu	2026
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja					
Sasaran 2 : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan					
No	**Permasalahan Utama**	**Strategi Peningkatan Kinerja**	**Program/Kegiatan Pendukung**	**Target Kinerja**	**Waktu Penyelesaian**
1	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kinerja	Penguatan perencanaan berbasis kinerja dan *outcome*	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis indikator kinerja	Seluruh program memiliki indikator *outcome*	2026-2027
2	Pemahaman SAKIP belum merata	Peningkatan pemahaman dan implementasi SAKIP	Bimbingan teknis SAKIP dan LKjIP	Nilai SAKIP meningkat	2026–2027
3	Monitoring dan evaluasi belum optimal	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja	Pelaksanaan evaluasi kinerja berkala	Capaian indikator kinerja ≥95%	2026–2027

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan

No	Permasalahan Utama	Strategi Peningkatan Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Target Kinerja	Waktu Penyelesaian
1	Produktivitas budidaya perikanan belum optimal	Penerapan teknologi budidaya perikanan berkelanjutan	Pengembangan budidaya ikan sistem bioflok	Produksi budidaya meningkat ≥10%	2026
2	Sarana dan prasarana nelayan terbatas	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap dan sarana pendukung	Produksi perikanan tangkap meningkat	2026
3	Kapasitas SDM pelaku usaha perikanan masih rendah	Peningkatan kompetensi pembudidaya dan nelayan	Pelatihan dan pendampingan teknis	Jumlah pelaku usaha terlatih meningkat	2026
4	Tekanan terhadap sumber daya perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan	Pengawasan dan konservasi perairan	Keberlanjutan stok sumber daya terjaga	2026

Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

No	Permasalahan Utama	Strategi Peningkatan Kinerja	Program/Kegiatan Pendukung	Target Kinerja	Waktu Penyelesaian
1	Nilai tambah hasil perikanan masih rendah	Peningkatan pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	Pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan	Produksi olahan meningkat ≥15%	2026-2027
2	Mutu dan standar produk belum optimal	Peningkatan mutu dan keamanan pangan olahan	Fasilitasi sertifikasi dan standar mutu produk	Produk bersertifikat meningkat	2026-2027
3	Akses pasar produk olahan terbatas	Penguatan pemasaran produk olahan perikanan	Promosi dan kemitraan pemasaran	Jangkauan pasar produk meningkat	2026

4.3. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan sekaligus sebagai instrumen manajemen kinerja. Laporan kinerja dimanfaatkan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang menjadi gambaran atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Informasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kinerja organisasi.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 tersebut telah dimanfaatkan untuk:

1. **Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027**, khususnya dalam penajaman sasaran, penyesuaian indikator kinerja, serta pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil (outcome).
2. **Bahan evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja**, sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur dan mewujudkan prinsip keadilan dan objektivitas dalam sistem remunerasi.
3. **Penyesuaian strategi dan kebijakan pada Renstra Perubahan**, agar selaras dengan hasil evaluasi capaian kinerja, dinamika kebijakan, serta kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
4. **Bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya**, termasuk perbaikan desain kegiatan dan penguatan indikator kinerja.
5. **Dasar penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, khususnya dalam meningkatkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan pemanfaatan laporan kinerja tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memastikan bahwa laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, semoga dapat memacu pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Demak, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

2025

2025

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA,
CASCADING, POHON KINERJA

DINLUTKAN

KAB DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nanang Tasunar DN, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E
Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
dr. Hj. Eisti'anah, S.E.	Ir. Nanang Tasunar DN, M.M. Pembina Utama Muda NIP 196702101993031009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,5
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Nilai Sakip	79,3
4	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Tiap Perangkat Daerah	Persenatse indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100 %
5	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolah Hasil Perikanan	8,8 %
6	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Tangkap Dan Kelautan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	59,840 Ton
7	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	5,3 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.822.423.800,00	DAU
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.600.000.000,00	DAU

3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.964.500.000,00	DAU
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.150.000.000,00	DAU, DBHCHT

Demak, 15 Januari 2025

Bupati Demak

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

Ir. Nanang Tasunar DN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670210 199303 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 53, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685368, Faksimile (0291) 685368,
Laman dinlutkan.demakkab.go.id, Pos-el dinlutkan@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196702101993031009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,6
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3.	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,3
4.	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Tiap Perangkat Daerah	Persenatse indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
5.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolah Hasil Perikanan	8,8
6.	**Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Tangkap Dan Kelautan**	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	61.035
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	5,67

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.411.822.767,00	DAU
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.584.082.530,00	DAU
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DBHCHT	Rp. 1.925.270.000,00	DAU
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.172.020.000,00	DAU

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

Ir. Nanang Tasunar D.N., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196702101993031009

CASECADING

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Daerah

Sasaran Daerah:
Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan [1.1]
Indikator:
1. Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)

Tujuan OPD

Tujuan OPD:
Meningkatkan perekonomian sektor perikanan
Indikator:
1. PE Sub Kategori Perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Indikator:
1. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator:
Produksi perikanan tangkap
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlatih/sana dengan baik
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Indikator:
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Indikator:
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Cakupan bina kelompok nelayan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil
Indikator:
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Indikator:
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Indikator:
Jumlah Sarpras penyelenggaraan TPI yang tersedia
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Indikator:
Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Indikator:
Jumlah Layanan dalam tangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil
Indikator:
Cakupan bina kelompok pembudidaya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
Indikator:
Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Indikator:
Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Indikator:
Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
Indikator:
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Indikator:
Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi
Indikator:
Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi
Indikator:
Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
Indikator:
1. Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
Indikator:
produksi pengolahan hasil perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Indikator:
Jumlah data dan informasi usaha pengolahan ikan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko
Indikator:
Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Indikator:
Jumlah Pohbahsar yang terbina pada produk olahan perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
Indikator:
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator:
Jumlah kebutuhan bahan baku ikan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Indikator:
1. Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Program

Sasaran Program:
meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah
Indikator:
Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, pengangganan dan evaluasi sesuai dengan tahapan dari sistim
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator:
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator:
Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Gaji dan Tunjangan A SN
Indikator:
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator:
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator:
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator:
Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator:
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator:
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator:
Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Indikator:
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator:
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator:
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator:
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator:
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Indikator:
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator:
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator:
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator:
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator:
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator:
Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator:
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Mebel
Indikator:
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator:
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator:
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator:
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator:
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
Indikator:
Jumlah Mebel yang Dipelihara
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator:
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator:
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator:
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator:
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Dinas Kelautan Dan Perikanan

Demak, 27 Mei 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

Ir. Nanung Tasunar D.N, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196702101993031009

POHON KINERJA DINLUTKAN

Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat PD

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif
Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Meningkatnya Kualitas Perbaikan Kinerja yang Berkelanjutan
Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pemeliharaan BMD
Jumlah BMD yang Terpelihara

- Terlaksananya Jasa Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Jumlah jasa Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
  - Jumlah Mebel yang Dipelihara
- Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaYang Dipelihara/ Direhabilitasi
- Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Disediakan
- Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya
  - Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/Direhabilitasi

Terpenuhinya Dukungan Jasa Penunjang Layanan
Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia

- Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat
  - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Terpenuhinya Kebutuhan BMD Penunjang Layanan
Jumlah BMD yang diadakan

- Terlaksananya Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya
  - Jumlah Mesin dan Peralatan lainnya yang Diadakan
- Terlaksananya Pengadaan Mebel
  - Jumlah Mebel yang Diadakan
- Tersedianya sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Jumlah sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Jumlah kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Disediakan

Terpenuhinya Dukungan Administrasi Umum Penunjang Layanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terpenuhinya Dukungan Kepegawaian Penunjang Layanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi

- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Terselenggaranya Administrasi BMD
Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi

- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
  - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP
Jumlah laporan keuangan

- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
  - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

POHON KINERJA
DINLUTKAN

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian sektor perikanan
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan
LPE Subkategori Perikanan

Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyediaan Sarpras Perikanan Tangkap dan Peningkatan Kapasitas KUB dan SDM
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap

- **Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**
  Kelompok Nelayan yang memperoleh bantuan Pemerintah
- **Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**
  Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
- **Terlaksanakannya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten**
  Jumlah Nelayan kecil yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten
- **Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**
  Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
- **Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**
  Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,
- **Terlaksanakannya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**
  Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- **Terlaksananya Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan**
  Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Melalui Pemenuhan Sarpras Produksi Budidaya ikan serta pembinaan kepada pelaku perikanan budidaya
Jumlah Total Produksi Budidaya Perikanan

- **Terlaksanakannya Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**
  Cakupan Pembudidaya Ikan yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten
- **Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil**
  Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
- **Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**
  Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya
- **Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**
  Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh bantuan Pemerintah
- **Tersedianya Data Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 Daerah kabupaten**
  Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
  Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
- **Terlaksannaya Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**
  Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan ,dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- **Tersedianya Data Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 Daerah kabupaten**
  Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- **Tersedianya Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten**
  Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

Meningkatkan nilai tambah hasil pelaku usaha perikanan melalui diversifikasi produk perikanan dan hasil olahannya
Jumlah omset UMKM

- **Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan hasil Perikanan bagi usaha Mikro dan Kecil**
  Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah Usaha Pemasaran, Pengolahan Hasil Perikanan dan Jumlah Pengolah, Pemasar yang terlatih
- **Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahn Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten**
  Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
- **Terlaksananya Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**
  Jumlah Pengolah dan Pemasar yang terfasilitasi dengan mitra
- **Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**
  Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
- **Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**
  Pengolah dan Pemasar terfasilitasi yang memperoleh bantuan pemerintah
- **Terlaksananya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
  Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Terfasilitasi

LKjIP

Dinas Kelautan dan Perikanan

2025

dinlutkan.demakkab.go.id dinlutkandemak dinlutkandemak@gmail.com